

**KERJASAMA *STAKEHOLDER* DALAM PENGEMBANGAN
KAWASAN KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN
(KKMB) KOTA TARAKAN**

(Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Tarakan)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Ujian Skripsi pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya**

MUHAMMAD RIFALDI A.P

NIM. 125030502111001



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

MINAT ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

MALANG

2018

MOTTO

TIDAK ADA KRITIKKAN YANG DATANG UNTUK
MEMBUAT SESEORANG MENJADI LEMAH

(Muhammad Rifaldi A.P)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kerjasama Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Tarakan)

Disusun Oleh : Muhammad Rifaldi Anjar Pratama

Nim : 125030502111001

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Minat Administrasi Pemerintahan

Malang, 26 Maret 2018

Komisi Pembimbing**Ketua Komisi Pembimbing****Anggota Komisi Pembimbing**

Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc
NIP. 19560801 198701 1 100

Dr. Drs. Moch. Rozkin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi yang berjudul "**Kerjasama Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan** (Studi pada Dinas Pariwisata Kota Tarakan)" tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di kutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan sumber pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 2 Mei 2018



Muhammad Rifaldi A.P
125030502111001

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Mei 2018
Waktu : 12.00 – 13.00 WIB
Skripsi Atas Nama : Muhammad Rifaldi Anjar P
Judul : Kerjasama Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan (Studi Pada Dinas Psariwisata Kota Tarakan)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Dr. Drs. Luqman Hakim, M.Sc
NIP. 19560801 198701 1 100

Anggota

Dr. Drs. Moch. Rozkin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota

Dr. Siswidiyanto, MS
NIP.19600717 198601 1 002

Anggota

Erlita Cahvasari, S.AP, M.AP
NIP. 2011078607242001

Halaman Persembahan

Kupersembahkan Karyaku

Kepada Kedua Orangtua tercinta saya
yaitu Ayah Sujarwo dan Ibu Mariani Badawi
Atas Segala Perjuangan, Tetesan Keringat serta Doa
dalam setiap mendidikku,
Kepada adik-adik saya tercinta yang selalu mendukung
disetiap proses saya hingga saat ini.

RINGKASAN

Pratama Muhammad Rifaldi A **RINGKASAN**, 2018, **Kerjasama Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan** (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Tarakan). Ketua: Dr. Luqman Hakim, M.Sc , Anggota: Dr. Mochammad Rozikin, M.AP.

Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) di Kota Tarakan membuat keberadaan habitat hutan mangrove di Kota Tarakan semakin baik. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan serta menganalisis bagaimana kerjasama *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak kerjasama pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) di Kota Tarakan. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengembangan kawasan KKMB, Pemerintah Kota Tarakan mendapatkan dukungan dari banyak pihak baik dari dinas-dinas terkait, badan usaha dan juga masyarakat. Dukungan tersebut dilakukan melalui kerjasama dalam bentuk perjanjian tertulis dan juga melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Kerjasama pengembangan kawasan KKMB telah memberikan berbagai dampak di antaranya dampak ekonomi yaitu terciptanya kegiatan kepariwisataan di kawasan KKMB yang dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah Kota Tarakan. Dampak sosial yaitu terciptanya ruang belajar baru bagi dunia pendidikan sehingga masyarakat dapat menikmati panorama alam dan juga bisa belajar mengenal habitat hutan mangrove. Dampak lingkungan yaitu Meningkatnya luas kawasan KKMB sehingga terbentuk kawasan KKMB 2 untuk di kembangkan seperti yang telah di lakukan di kawasan KKMB 1 Kota Tarakan.

Kunci : Kerjasama, Stakeholder, Corporate Social Responsibility

SUMMARY

Pratama Muhammad Rifaldi A, 2018, **Stakeholder Cooperation in the Development of Mangrove and Bekantan Conservation Area (Studies at Tarakan City Tourism Office)**. Advisor: Dr. Luqman Hakim, Co-Advisor: Dr. Mochammad Rozikin, M.AP.

Development of Mangrove and Bekantan Conservation Area (KKMB) in Tarakan City makes the existence of mangrove forest habitat in Tarakan City the better. The objectives of the research are to describe and analyze how stakeholder cooperation in the development of Mangrove and Bekantan Conservation Area (KKMB) and to describe and analyze the impact of the development of Mangrove and Bekantan Conservation Area (KKMB) in Tarakan City. Research type in this research is descriptive research type with qualitative approach.

The result of this research is in development of KKMB area, Tarakan City Government get support from many parties both from related offices, business entity and also society. The support is done through cooperation in the form of written agreement and also through Corporate Social Responsibility (CSR) program. Cooperation of KKMB area development has given various impacts including the economic impacts of creating tourism activities in the area of KKMB that can help increase the income of the city of Tarakan. The social impact is the creation of a new learning space for the world of education so that people can enjoy the natural scenery and also can learn to know the habitat of mangrove forest. The environmental impact of increasing the area of KKMB to form KKMB 2 area to be developed as it has been done in the area of KKMB 1 Kota Tarakan.

Keywords: Cooperation, Stakeholder, Corporate Social Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KERJASAMA STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN KONSERVASI MANGROVE DAN BEKANTAN (KKMB)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) pada Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberika berkah dan ridhonya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Drs. Andy Fefta Wijaya, MDA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Dr. Luqman Hakim, M.Sc selaku Ketua Minat Administrasi Pemerintahan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan juga selaku Ketua Dosen Pembimbing yang telah meluangkan

waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.

5. Dr. Mohammad Rozikin, M.Si selaku Anggota Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan serta pengarahan kepada peneliti selama proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh dosen dan staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama perkuliahan.
7. Keluarga tercinta yang selalu mengiringi dan mendukung setiap langkah peneliti dengan doa, kasih sayang dan dukungan sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Yualita Windi L yang selalu mendukung setiap langkah peneliti dengan doa dan kasih sayang sehingga peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh teman teman terbaik saya, Lintang, Fajar Cokro, Cipto, Sadjida, Verro, dan Rosy, yang selalu memberikan dukungan dalam pembuatan skripsi ini.
10. Seluruh Pegawai di Kantor Dinas Pariwisata Kota Tarakan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama proses pembuatan skripsi berlangsung sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milih Allah SWT semata, untuk itu peneliti mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan atas penulisan skripsi ini.

Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat peneliti harapkan. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak lain yang membutuhkan.

Malang, 1 Maret 2018

Muhammad Rifaldi A. P



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah.....	18
1)Pemerintah Daerah.....	18
2)Governance.....	23
3)Good Governance (GG)	24
4)Good Corporate Governance	29
a) Konsep Good Corporate Governance (GCG).....	29
b) Prinsip Good Corporate Governance (GCG).....	30
5)Corporate Social Responsibility (CSR).....	35
B. Kerjasama.....	38
1. Pengertian Kerjasama	38
2 Prinsip Kerjasama	40
3 Bentuk Perjanjian dan Pengaturan Kerjasama	41
C. Stakeholder.....	42
1. Pengertian Stakeholder	42
2. Stakeholder dalam Governance	42
3. Identifikasi Stakeholder	43
D. Pembangunan Berkelanjutan (<i>Sustainable Development</i>).....	45
E. Konservasi Hutan Mangrove.....	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	54
B. Fokus Penelitian	55
C. Lokasi dan Situs Penelitian	56

D. Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Instrumen Penelitian	59
G. Analisis Data	60

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	61
1.1 Gambaran Umum Kota Tarakan	61
1.1.1 Kondisi Geografis Kota Tarakan	65
1.1.2 Kondisi demografi Kota Tarakan	66
1.1.3.1 Pertumbuhan Penduduk Kota Tarakan	66
1.1.3.2 Ketenagakerjaan di Kota Tarakan	67
1.1.3.3 Potensi Pariwisata	69
1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Tarakan	70
1.3 Gambaran Umum Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan	72
2. Penyajian Data	74
2.1.1 Aktor yang terlibat	74
2.1.2 Peran Stakeholder	82
1. Pemerintah Daerah	82
a) Dinas Pariwisata	82
2. Badan Usaha	85
a) PT. Pertamina EP Tarakan	85
b) PT. Mustika Aurora	86
3) Masyarakat	87
2.1.3 Bentuk Kerjasama	91
2.1.4 Program Kerjasama	92
2.1.5 Koordinasi	99
2.2 Dampak Pengembangan kawasan konservasi <i>Mangrove</i> dan Bekantan	101
2.2.1 Dampak Ekonomi	101
2.2.2 Dampak Sosial	103
2.2.3 Dampak Lingkungan	105
3. Analisis dan Pembahasan	108
3.1 Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan	108
3.1.1 Aktor yang terlibat	108
3.1.2 Peran <i>Stakeholder</i>	113
3.1.3 Bentuk Kerjasama	115
3.1.4 Program Kerjasama	116
3.1.5 Koordinasi	118
3.2 Dampak Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan	120
3.2.1 Dampak Ekonomi	120
3.2.2 Dampak Sosial	122
3.2.3 Dampak Lingkungan	123

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	125
B. Saran	127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah pertumbuhan penduduk

Kota Tarakan Pada Tahun 2016..... 67

Tabel 2 Peran stakeholder dalam pengembangan Kawasan KKMB 89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Hubungan antar sektor	27
Gambar 2 Analisis Data Model Interaktif	62
Gambar 3 Peta Kota Tarakan	63
Gambar 4 Logo Kota Tarakan.....	64
Gambar 5. Gedung Gadis/Kantor Dinas Pariwisata Kota Tarakan.....	72
Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Tarakan.....	74
Gambar 7. Gerbang masuk kawasan KKMB	75
Gambar 8. Peranan antar Stakeholder	89
Gambar 9. Jembatan Pejalan Kaki	93
Gambar 10. Pembangunan jalan Bekantan	94
Gambar 11. Rumah Karantina Hewan	95
Gambar 12. Tempat Sampah.....	96
Gambar 13. Perkembangan luas kawasan KKMB	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan salah satu kekayaan sumber alam Indonesia yang tiada ternilai harganya, termasuk di dalamnya kawasan hutan mangrove dengan ekosistem yang khas dan unik. Kekayaan alam yang satu ini mempunyai potensi yang besar bagi kepentingan manusia. Hutan mangrove adalah komunitas vegetasi pantai tropis, dan merupakan komunitas yang hidup di dalam kawasan yang lembap dan berlumpur serta di pengaruhi pasang surut air laut. Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang kompleks dan khas, serta memiliki daya dukung cukup besar terhadap lingkungan di sekitarnya. Menurut Hudspeth, et al. Dalam Harahap (2010:61) bahwa ekosistem mangrove menyediakan sejumlah barang dan jasa yang penting bagi manusia dan makhluk hidup lainnya diantaranya:

1. Mangrove menyimpan CO₂ dan pertumbuhannya menghasilkan O₂ dan juga dapat menghasilkan gas SO₂ dari atmosfer.
2. Mangrove sebagai penyangga terhadap dampak badai bahkan tsunami
3. Mempunyai kapasitas terhadap penyerapan limbah
4. Mampu menahan erosi dan sedimentasi
5. kontrol biologi, tempat hidup habitat biota, sumber genetik sebagai bahan obat-obatan.
6. Tempat rekreasi dan nilai-nilai budaya.

Sedangkan menurut Purnobasuki (2005:17-18) menyebutkan bahwa potensi mangrove dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yaitu dari sisi ekologis, bahwa lebih menekankan pada kemampuan dalam mendukung ekosistem lingkungan pantai, yaitu sebagai hutan di kawasan air payau, penahan air dan angin, penangkis

gempuran ombak, tempat persembunyian ikan dan binatang perairan lainnya seperti udang dan lain-lain. Sedangkan dari sisi ekonomi, lebih difokuskan pada kemampuan mangrove dalam menyediakan bahan, produk, dan lingkungan yang dapat diukur dengan uang. Salah satu produk dari hutan mangrove yang secara ekonomi potensial adalah kayu. Lingkungan mangrove yang asri dan teduh juga dapat dijadikan objek wisata (agrowisata) yang potensial.

Wilayah Indonesia terdiri atas 17.508 pulau dan memiliki panjang garis pantai sekitar 81.000 km dan merupakan negara yang memiliki hutan mangrove terluas didunia. Vegetasi mangrove yang terdapat di kepulauan Indonesia dan Malaysia lebih kompleks dan kaya akan jenis dibandingkan dengan negara-negara didunia. Luas hutan mangrove di Indonesia mencapai 4,25 juta ha dan tersusun oleh lebih dari 45 jenis dan suku mangrove. Kondisi hutan mangrove di Indonesia saat ini mengalami kerusakan dan kemerosotan, yang diakibatkan oleh kurangnya informasi serta kesadaran masyarakat. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkaitan dengan sumber daya mangrove masih sangat terbatas sehingga belum dapat mendukung penataan ruang, pembinaan, pemanfaatan yang lestari, perlindungan dan rehabilitasi (Purnobasuki, 2005:2).

Keberadaan mangrove di Indonesia saat ini terus mengalami penyusutan akibat dampak kegiatan manusia pada kawasan hutan mangrove. Pengalihan lahan hutan mangrove seperti tebang habis, penambangan dan ekstrasi mineral serta konversi menjadi lahan pertanian, perikanan memberikan dampak yang sangat besar bagi keberlangsungan ekosistem mangrove. Akibatnya adalah

keberlangsungan hidup ekosistem mangrove menjadi berkurang dan terancam pertumbuhannya serta memberikan dampak yang besar bagi lingkungan disekitarnya. Padahal, Kawasan mangrove di Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Berdasarkan data awal tahun 2013, luas wilayah konservasi perairan seluas 5.161.477,28 Ha (Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014). Namun, kerusakan hutan mangrove di Indonesia termasuk golongan yang tercepat. Dalam tiga dekade terakhir, Indonesia kehilangan 40% mangrove (FAO, 2007). Artinya, Indonesia memiliki kecepatan kerusakan mangrove terbesar di dunia (Campbell & Brown, 2015). Oleh karena itu, peran pengawasan dari pemerintah terhadap lingkungan sangatlah penting agar masalah kerusakan lingkungan tidak semakin parah.

Salah satu contoh yang terjadi pada kawasan hutan mangrove di Surabaya. Keberadaan kawasan mangrove di daerah tersebut terus mengalami penyusutan. Hal ini akibat dari penyerobotan lahan kawasan mangrove yang berubah fungsi menjadi kawasan permukiman. Selain penyerobotan lahan, penggunaan kawasan mangrove Surabaya sebagai obyek wisata juga memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Banyak sampah yang plastik yang ditemukan di kawasan tersebut merupakan hasil dari ketidaksadaran pengunjung akan menjaga kebersihan lingkungan. selain itu, peran pengawasan dan pengelolaan dari pihak pengelola dan juga pemerintah dianggap masih kurang.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di kawasan tersebut membuat Walikota Surabaya Tri Risma bergerak cepat dan langsung berkoordinasi dengan dinas terkait agar kerusakan kawasan mangrove yang terjadi tidak semakin parah.

Berdasarkan data dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kota Surabaya tahun 2011, jumlah kerusakan hutan mangrove di wilayah pantai timur Surabaya (Pamurbaya) seluas 62,029 ha. Ini akibat dari pengalihan lahan hutan mangrove menjadi lahan tambak dan pemukiman.

“Untuk menekan laju penyusutan hutan mangrove, Pemerintah Kota Surabaya menjadikan kawasan pantai timur Surabaya (Pamurbaya) sebagai kawasan konservasi mangrove. “Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk rehabilitasi, pendidikan lingkungan, serta pelatihan pengembangan hasil olahan produk mangrove,” kata Risma, di Surabaya.”(<http://sains.kompas.com/read/2012/11/06>)

Kasus tersebut merupakan salah satu contoh lemahnya peran pemerintah terhadap pelaksanaan pengawasan lingkungan serta pengelolaan kawasan yang tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, peran pemerintah merupakan hal yang penting didalam menjaga keberlangsungan ekosistem mangrove agar masalah kerusakan lingkungan tidak terus terjadi. Berdasarkan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengelola, mengatur dan mengawasi kekayaan alam yang ada dan salah satu kekayaan alam Indonesia adalah kawasan hutan mangrove.

Menurut Subing dalam Farhiana (2011:1-2), Usaha konservasi hutan mangrove di beberapa daerah telah dilakukan dibantu dari dinas terkait, namun hasil yang diperoleh terkadang kurang sesuai dengan biaya dan tenaga yang sudah dikeluarkan. Salah satu penyebab hasil yang tidak maksimal tersebut adalah kurangnya peran serta aktif masyarakat dalam upaya konservasi hutan mangrove

karena masyarakat cenderung dijadikan objek dan bukan subyek dalam upaya pembangunan. Adapun tujuan dari pelaksanaan konservasi mangrove, antara lain:

- a. Melestarikan vegetasi dan habitat hutan mangrove dengan tipe-tipe ekosistemnya
 - b. Melindungi jenis-jenis biota dengan habitat yang terancam punah
 - c. Mengelola areal bagi pembiakan jenis-jenis biota yang bernilai ekonomi
 - d. Melindungi unsur-unsur yang mempunyai nilai sejarah dan budaya
 - e. Mengelola areal yang bernilai estetis dan memanfaatkan areal tersebut bagi usaha rekreasi, urisme, pendidikan, penelitian, dan lain-lain.
- Purnobasuki (2005:81-82)

Emil Salim dalam Hessel (2004) menyebutkan bahwa penyumbang utama kerusakan lingkungan adalah industri. Aktivitas industri telah menghasilkan kotoran limbah sisa industri yang sangat serius mencemari lingkungan, oleh karena itu maka peran pemerintah menjadi sangat penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terkait dengan posisi pemerintah sebagai penentu kebijakan di bidang lingkungan hidup yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, bahwa daerah memiliki hak dan wewenang dalam mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui otonomi, pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya.

Dengan adanya konsep otonomi daerah membuat pemerintahan daerah menjadi mandiri dan diharapkan dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, keterlibatan

swasta dan komunitas lain didalam pelaksanaan pembangunan sangat diperlukan karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah seperti keterbatasan anggaran dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan kepada masyarakat. Widjaja (2002, 49-50) menyebutkan bahwa sesuai dengan paradigma *good governance* dan *reiventing government* dalam penyediaan prasarana dan pemberian layanan dapat melibatkan sektor swasta dan komunitas setempat dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip keterbukaan, dapat dipertanggungjawabkan dan keadilan bagi masing-masing pihak termasuk DPRD. Dengan ikut serta keterlibatan sektor swasta dan komunitas maka beban Pemerintah Daerah menjadi berkurang.

Menurut Kooiman dalam Sedarmayanti (2004:2) menyatakan bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintahan atas kepentingan-kepentingan tersebut. *Governance* pada dasarnya bukan hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti kepengurusan, pengelolaan, pengarahan, dan pembinaan penyelenggaraan. Sedarmayanti (2004) juga menyebutkan bahwa prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang kuat agar peran pemerintah dikurangi dan peran masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintahan) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Oleh karena itu, untuk mendukung

praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu adanya keterlibatan dari berbagai pihak baik swasta maupun komunitas didalam penyediaan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan daerah.

Kerjasama dengan berbagai pihak dalam penyediaan infrastruktur merupakan hal yang sangat perlu untuk dilakukan. Keterbatasan anggaran serta sumberdaya manusia merupakan alasan untuk dilakukannya kerjasama dengan swasta. Berdasarkan Perpres No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur disebutkan bahwa Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik. Untuk memperlancar pelayanan dan jaringan struktur maka pembangunan infrastruktur sangatlah penting. Adapun tujuan kerjasamanya adalah untuk mencukupi pendanaan secara berkelanjutan dalam penyediaan infrastruktur melalui pengeralahan dana swasta serta menciptakan iklim investasi dan mewujudkan penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien, tepat sasaran, dan tepat waktu.

Secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktek *good governance* (GG) dalam Wahyudi dan Azheri (2008:134) antara lain

- a. Praktek *Good Governance* (GG) harus memberi ruang kepada aktor lembaga non pemerintahan untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi diantara aktor dan lembaga pemerintah dengan non pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar.
- b. Dalam praktek *Good Governance* terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan

kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan dan daya tanggap menjadi nilai yang penting.

- c. Praktek *Good Governance* adalah praktek pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktek pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakkan hukum, dan akuntabilitas publik.

Good governance merupakan upaya merubah watak pemerintah (*government*) yang semula cenderung bekerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, menjadi pemerintahan yang aspiratif. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang menerapkan *good governance* masyarakat tidak lagi dipandang sebagai obyek yang ingin dicetak sebagaimana diinginkan pemerintah. Tetapi masyarakat menjadi subyek yang dituruti mewarnai program-program dan kebijakan pemerintah. Sistem pemerintahan yang menjadikan masyarakat sebagai subyek hanya terdapat dalam sistem pemerintahan yang demokratis.

Adapun 10 prinsip untuk terselenggarakannya *good governance* menurut *United Nation Development Programme* (UNDP) dalam Basuki dan Shofwan (2006:11-12) diantaranya:

1. Partisipasi
2. Penegakkan Hukum
3. Tranparansi
4. Kesetaraan
5. Daya Tanggap
6. Wawasan Ke Depan
7. Akuntabilitas
8. Pengawasan
9. Efisiensi dan Efektivitas
10. Profesionalisme

Dalam melaksanakan pembangunan perekonomian juga perlu memperhatikan pembangunan secara berkelanjutan. Menurut Soemarwoto (2001)

menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan mengandung arti, lingkungan dapat mendukung pembangunan dengan terus menerus karena tidak habisnya sumberdaya yang menjadi modal pembangunan. Aspek lainnya adalah aspek ekonomi dan aspek sosial. Ketiga aspek tersebut harus berada dalam keadaan seimbang sehingga tidak ada aspek yang paling diprioritaskan. Artinya dalam pembangunan yang selama ini hanya memperhatikan aspek ekonomi, harus pula memperhatikan aspek lingkungan dan aspek sosial. Dengan begitu, pembangunan daerah dengan konsep pembangunan berkelanjutan tidak akan membahayakan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Elkington dalam Wibisono (2007:32) memberikan pandangannya bahwa perusahaan yang ingin berkelanjutan haruslah memperhatikan “3P”. Selain mengejar *profit*, perusahaan juga mesti memperhatikan dan terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan turut berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*). Dengan adanya berbagai program kepedulian terhadap lingkungan diharapkan keberadaan ekosistem lingkungan hidup dapat terus terjaga.

Salah satu keterlibatan sektor swasta maupun komunitas dalam pembangunan daerah ada pada kegiatan pelestarian lingkungan hidup salah satunya yaitu pelestarian kawasan mangrove. Pemerintah Daerah terus berupaya mengatasi masalah-masalah kerusakan lingkungan pada kawasan mangrove. Oleh karena itu, Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari berbagai perusahaan baik swasta maupun negeri. *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) merupakan tanggung jawab soal korporasi. Pelaksanaan program CSR tersebut berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate*

Governance (GCG) yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *independency*, dan *Fairness*. Pada saat ini, perusahaan-perusahaan yang ada tidak hanya bertanggung jawab pada pembangunan perekonomian saja melainkan juga bertanggung jawab pada sosial dan pelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan baik swasta maupun negeri saat ini yang melaksanakan program-program CSR seperti pembangunan jalan desa, pengembangan lingkungan melalui penanaman bibit pohon pembangunan infrastruktur diberbagai wilayah salah satunya pada kawasan konservasi yang bertujuan untuk memperlancar pengelolaan serta pengawasan kawasan konservasi mangrove.

Kota Tarakan merupakan sebuah wilayah yang terletak di provinsi Kalimantan Utara. Kota Tarakan merupakan gerbang pembangunan ekonomi di wilayah Kalimantan Utara karena Kota Tarakan memiliki infrastruktur yang menunjang untuk pembangunan ekonomi wilayah Kalimantan utara. Memiliki Bandara Internasional serta pelabuhan bertaraf internasional juga menjadikan Kota Tarakan sebagai kota transit, perdagangan dan jasa. Daerah yang dulunya dikenal sebagai pulau penghasil minyak ini memiliki jumlah penduduk sebesar

239.787 jiwa yang terdiri dari penduduk asli yaitu Suku Tidung maupun pendatang yang datang dari berbagai daerah di wilayah Indonesia.

Kota transit ini memiliki kawasan konservasi mangrove yang pengelolaannya berada ditangan pemerintahan langsung. Pengelolaan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan berada di bawah koordinasi Dinas Pariwisata Kota Tarakan berdasarkan SK Walikota Tarakan nomor 552/HK-IX/741/2010. KKMB Kota Tarakan terletak dipusat kota tepatnya di Jl. Gajah Mada dan terletak berdekatan dengan salah satu pusat perbelanjaan. Pada awalnya, KKMB hanyalah kawasan hutan mangrove biasa yang tidak terawat. Karena kawasan hutan mangrove yang terus berkurang populasinya dikarenakan pengalihan lahan menjadi perumahan maupun tambak, oleh karena itu Walikota Kota Tarakan pada saat itu yang dipimpin Bapak Dr. H. Yusuf SK berinisiatif menjadikan kawasan mangrove tersebut menjadi kawasan konservasi dengan melakukan reboisasi dan penghijauan kembali kawasan tersebut. Kawasan KKMB berdiri sejak tahun 2003. Kota Tarakan merupakan salah satu daerah dari 7 daerah program kerjasama pengembangan kawasan mangrove yang dilaksanakan Kementrian Kehutanan dan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada tahun 2011 hingga 2014. Keberadaan KKMB saat ini merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kota Tarakan. Bagi sebagian peneliti, KKMB merupakan laboratorium hidup karena KKMB sering dijadikan tempat penelitian bagi beberapa peneliti lokal maupun peneliti dari luar negeri.

Dalam pengembangan kawasan konservasi, Keberlangsungan hidup ekosistem mangrove serta Keberadaan infrastruktur merupakan hal yang hal diperhatikan oleh pihak pengelola KKMB. Kawasan konservasi yang juga digunakan sebagai salah satu tempat rekreasi di Kota Tarakan tersebut perlu memiliki fasilitas yang layak untuk memberikan kenyamanan bagi seluruh pengunjung yang datang maupun penghuni kawasan tersebut. Kebutuhan akan jembatan yang layak untuk dilalui serta rumah hewan merupakan infrastruktur yang penting agar pengelolaan dan pengawasan kawasan KKMB dapat berjalan baik. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat pengembangan dan pengelolaan KKMB menjadi lambat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka diperlukan partisipasi dari pihak masyarakat maupun swasta. Selain itu, kewajiban perusahaan pada lingkungan juga memang menjadi suatu keharusan. Seluruh perusahaan negeri maupun swasta saat ini tidak hanya berpengaruh pada perekonomian saja melainkan juga bertanggung jawab pada lingkungan hidup. Maka dari itu, banyak perusahaan yang membuat program pelestarian lingkungan hidup. Dengan adanya program-program pelestarian alam menjadikan lingkungan tetap terjaga kelestariaannya.

Pada saat ini, pengembangan KKMB dilakukan dengan memanfaatkan berbagai program kerjasama dari berbagai perusahaan baik swasta maupun negeri. Perusahaan-perusahaan yang bekerjasama dengan pemerintah daerah Kota Tarakan melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*) tersebut memberikan berbagai macam bantuan seperti pembangunan rumah hewan,

pembangunan jembatan, pemberian bibit pohon bakau, dan lain-lain. Salah satu perusahaan yang melaksanakan kerjasama dalam pengembangan KKMB adalah PT. Mustika Minanusa Aurora. Perusahaan yang bergerak di bidang pembekuan ikan dan udang windu terbesar di Kalimantan Utara tersebut telah memulai perjanjian kerjasama pengembangan KKMB sejak tahun 2006. Adapun tujuan dari kerjasama tersebut adalah kepedulian terhadap lingkungan serta menjaga keseimbangan lingkungan.

“Penandatanganan MoU tersebut dilakukan oleh Walikota Tarakan dr. Jusuf SK, Direktur PT Mustika Aurora Mohamad Soeprapto dan Direktur Eksekutif WWF-Indonesia Dr. Mubariq Ahmad. Tujuan MoU ini adalah terehabilitasinya hutan mangrove di Pulau Tarakan melalui upaya reforestasi. Diharapkan dengan kesepakatan ini, fungsi mangrove Pulau Tarakan sebagai habitat flora dan fauna penting, hutan yang bermanfaat bagi pendidikan, pengembangan penelitian, wisata dan usaha perikanan pantai dapat dicapai.”(www.wwf.or.id/18/2/2017)

Kegiatan yang sering dilakukan dalam kerjasama tersebut adalah penanaman bibit pohon bakau. Dengan sering ditanamnya bibit bakau, ini berarti memperluas sedikit demi sedikit kawasan konservasi KKMB. Kerjasama tersebut telah membuat kawasan KKMB menjadi luas. Hingga saat ini, luas KKMB sekitar 22 Ha.

Dengan memanfaatkan program kerjasama tersebut diharapkan pengembangan kawasan KKMB dapat berjalan sesuai kebutuhan yang ada. Selain menjadi lahan konservasi, kawasan KMB juga dimanfaatkan sebagai kawasan ekowisata bagi masyarakat Kota Tarakan. Kerjasama dalam hal penghijauan kawasan mangrove saja dirasa tidak cukup. Kebutuhan pengembangan dan pengelolaan terhadap kawasan konservasi sangatlah membutuhkan infrastruktur

yang memadai. Oleh karena itu, pemerintah daerah sebaiknya mencari investor untuk bekerjasama dalam pembangunan infrastruktur pada kawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahas lebih jauh mengenai beberapa hal diatas dalam judul “**Kerjasama Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan** (studi pada Dinas Pariwisata Kota Tarakan)” yang dijalankan oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan dalam melakukan pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu:

- 1) Bagaimana kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB)?
- 2) Apa dampak dari kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB).
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis dampak kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan juga untuk keperluan praktis, sebagai berikut:

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pembaharuan ilmu pengetahuan dibidang Pemerintahan serta diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penelitian yang akan datang.

2) Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, masyarakat umum, serta sebagai referensi bagi kajian hukum di bidang kerjasama pemerintah dan swasta khususnya dalam penyediaan infrastruktur. Disamping itu, penelitian dan analisa dalam skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi perusahaan baik milik negara maupun milik swasta yang bermaksud berkerjasama dengan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memudahkan penulis dalam mempelajari dan memahami secara keseluruhan pada penelitian ini. Sistematika pembahasan pada penelitian ini dibuat seperti yang telah tertera pada buku pedoman penyusunan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan penulis didalam penelitian ini. Tinjauan pustaka ini akan menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah, *Good Governance*, *Good Corporate Governance*, Pembangunan Berkelanjutan, Kerjasama, *Stakeholder*, dan Konservasi Hutan Mangrove

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian yang digunakan, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Instrumen Penelitian, Metode Penelitian

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian yang telah di olah kemudian dilakukan analisis antara hasil penelitian dengan teori yang relevan. Sehingga hasilnya menemukan jawaban dari masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan disertakan saran rekomendasi atas pencapaian tujuan pengembangan kawasan konservasi mangrove dan bekantan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Daerah

1. Pemerintah Daerah

Tujuan utama dari dibentuknya pemerintahan sendiri adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tentram, dan damai. Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama Rasyid (1998:139). Adapun fungsi pemerintah menurut Nurul Aini dalam Haryanto (1997:36-37) yaitu :

- a. Fungsi pengaturan yaitu fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis.
- b. Fungsi pelayanan yaitu fungsi yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*public services*) dan pelayanan sipil (*civil services*) yang menghargai kesetaraan.
- c. Fungsi pemberdayaan yaitu fungsi ini mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntut pemberdayaan pemerintahan daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan.

Pemerintah daerah merupakan pelaksana pemerintahan di daerah. dengan adanya program desentralisasi maka pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Seperti yang dijelaskan Muluk (2009:67) bahwa :

“Elemen yang terkandung dalam rentang pengertian *local government* merupakan konsekuensi dari adanya desentralisasi dalam arti sempit (devolusi). Dalam hal ini, *local government* dapat dimaknai menjadi tiga hal. Pertama, sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada organ yang melaksanakan urusan dan fungsi yang didesentralisasikan. Kedua, sebagai pemerintah daerah yang mengacu pada fungsi yang dijalankan dalam kerangka desentralisasi. Dan ketiga, sebagai daerah otonom tempat dimana loyalitas berada dan membentuk kesatuan hukum sendiri meskipun tidak berdaulat tetapi memiliki hak untuk mengurus dirinya sendiri”.

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka dimulai era baru dalam pemerintahan daerah dengan adanya otonomi luas dimana pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Dijelaskan Muluk (2009:114) bahwa pemerintah daerah berperan dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat tercermin dari pengguna instrumen kebijakannya. Dengan melakukan analisis terhadap penggunaan instrumen ini sebenarnya dapat diketahui bagaimana karakter pemerintah daerah apabila dibandingkan dengan unsur lain di luarnya. Dengan mengacu pada taksonomi instrumen kebijakan yang telah dilakukan oleh Howlett & Ramesh (1995) maka dapat dapat dibedakan adanya tiga kategori, yakni instrumen wajib (*compulsory instruments*), instrumen campuran (*mixed instruments*), dan instrumen sukarela (*voluntary instruments*)”.

Menurut Starling dalam Muluk (2007:59) mengemukakan bahwa tugas utama pemerintah daerah yang membedakan dengan sektor swasta adalah

menyediakan *public goods* dari pada *private goods*. Dengan kata lain, tujuan yang diamanatkan kepada pemerintah untuk menciptakan keadilan pelayanan kepada masyarakat umum. Dengan begitu pemerintah daerah akan terus berusaha untuk dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakatnya.

Peranan pemerintah seperti yang dijelaskan oleh Siagian (2009:142)

bahwa peranan pemerintah terlihat dalam lima wujud utama, yaitu:

- a. Selaku *Stabilisator*, pemerintah adalah *stabilisator* yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana-rencana, program-program dan kegiatan-kegiatan operasional akan berjalan lancar.
- b. Selaku *Modernisator*, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantarkan masyarakat yang sedang membangun menuju modernisasi dan meninggalkan cara dan gaya hidup tradisional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tata cara kehidupan modern.
- c. Selaku *Pelopor*, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan saja, tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.
- d. Selaku *Inovator*, inovasi merupakan salah satu “produk” dari kreativitas. Ditinjau dari segi administrasi pembangunan, inovasi berarti temuan baru, metode baru, sistem baru, dan yang terpenting, cara berpikir yang baru. Dengan demikian bahwa sistem, prosedur, dan metode kerja, serta pendekatan yang diperlukan adalah yang bersifat “*problem-solving*” dan “*action-oriented*”.
- e. Selaku *Katalisator*, bahwa pemerintah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadi faktor penghalang sehingga dampaknya dapat diminimalkan, dan dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.

Berkaitan dengan pengembangan Kawasan Mangrove dan Bekantan,

berdasarkan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, pemerintah wajib

menjaga dan mengelolanya dengan baik sumber daya alam yang ada untuk mensejahterahkan rakyatnya.

Pemerintah berupaya agar masyarakat bisa merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap pemerintahan dan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan dengan adanya perubahan pendekatan pembangunan. Menurut Suhendra (2006:55-56), masyarakat perlu diberi hak sekaligus tanggung jawab dari mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta menikmati hasil pembangunan sesuai dharma baktinya. Pendekatan inilah pada hakikatnya yang disebut *bottom up planning* dan *people empowering*. Dengan adanya peran partisipasi dari masyarakat tersebut, perubahan pendekatan pembangunan yang semua bersifat *top down* menjadi *bottom up*. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga sangat penting. Hal tersebut ditujukan agar masyarakat mampu berdaya saing dan tingkat sumber daya manusia bisa lebih baik lagi. Upaya yang dilakukan sejak perkembangan dan pergeseran peran pemerintahan tersebut dilakukan untuk pembangunan yang ideal.

Osborne dan Gabler dalam Sj Sumarto (2009:8) menjelaskan pemerintahan yang baik yaitu “*Steering*, ketimbang *rowing*, dan *enabling* ketimbang *providing*, pemerintah tidak perlu melakukan segalanya sendiri tetapi lebih memfasilitasi dan mengkoordinir, bukan mengarahkan dan mengontrol. Pergeseran fokus dari *old government* ke *new government* di era transisi menuju demokratisasi pada praktiknya akan menghadapi permasalahan yang kompleks.”

Dengan begitu, pemerintahan yang baik adalah suatu fungsi pemerintahan yang lebih mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembangunan yang ada. Berbeda dengan fungsi pemerintahan yang sebelumnya yang cenderung sebagai aktor tunggal dan membatasi stakeholder lain.

2. *Governance*

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling penting menentukan. Implikasinya, peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut (Hetifah, 2009:1-2).

Governance menurut definisi dari UNDP dalam Sedarmayanti (2003:4-5) adalah : “*The exercise of political, economic, administrative authority to manage a nation’s affair at all levels*” yang artinya adalah pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, administrasi untuk mengelola urusan suatu negara melalui semua tingkatan. Berdasarkan definisi ini, *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

1. *Economic governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making processes*) yang memfasilitasi terhadap *equity*, *poverty*, dan *quality of live*.

2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Institusi dari *governance* meliputi 3 domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Negara, sebagai satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak di berbagai sektor informal lain di pasar, sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik, dan ekonomi yang dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. masyarakat (*society*) terdiri dari individual maupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi dengan aturan formal maupun informal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat organisasi profesi dan lain-lain. Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid & bertanggungjawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

3. *Good Governance* (GG)

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara *Good Governance* dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu

aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyediaan jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas *Good Governance* itu sendiri (Hetifa, 2003:1-2).

Sj Sumarto (2009:1) juga menjelaskan bahwa *governance* merupakan peran pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut. Menurut UNDP dalam Sjamsuddin (2005:13), kelembagaan dalam *governance* meliputi tiga domain, yaitu negara atau pemerintah (*state*), sektor swasta, dan masyarakat madani (*civil society*).

a. Negara atau pemerintah

Pengertian negara atau pemerintahan dalam hal ini secara umum mencakup keseluruhan lembaga politik dan sektor publik. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat (*civil society organization*). Peranan dan tanggung jawab pemerintah adalah meliputi penyelenggaraan kekuasaan untuk memerintah dan membangun lingkungan yang kondusif bagi tercapainya tujuan pembangunan baik level lokal, nasional maupun internasional dan global.

b. Sektor swasta (*private sector*)

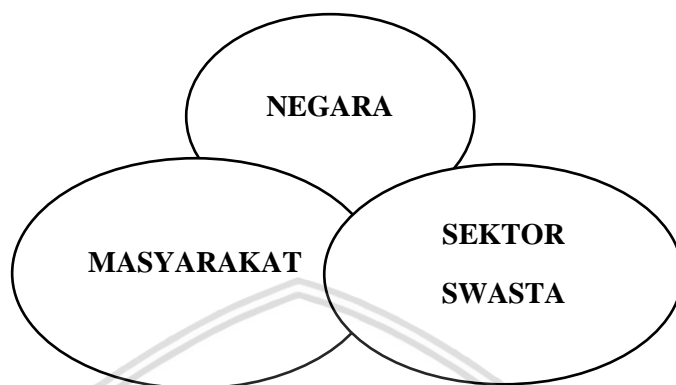
Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi sistem pasar, seperti : industri pengolahan (*manufacture*), perdagangan perbankan dan koperasi termasuk juga kegiatan sektor informal. Peranan sektor swasta sangatlah penting dalam pola pemerintahan dan pembangunan, karena peranannya sebagai sumber peluang untuk meningkatkan produktivitas, penyerapan tenaga kerja, sumber penerimaan, investasi publik, pengembangan usaha, dan pertumbuhan ekonomi.

c. Masyarakat Madani (*civil society*)

Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau ditengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi. Kelembagaan masyarakat madani tersebut umumnya dapat dirasakan oleh masyarakat melalui kegiatan fasilitas masyarakat mobilisasi.

Sedangkan menurut Syafri (2012:177) institusi dari *governance* meliputi tiga domain yaitu, *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak

kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik. Berikut ini adalah gambar antar sektor.



Gambar 1. Hubungan antar sektor

Sumber: Syafri (2012:177)

Menurut Bank Dunia dalam Wahab (2002:34) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *Administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. Selain itu Bank Dunia juga mensinonimkan *good governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat.

Berdasarkan hal ini, UNDP kemudian mengajukan karakteristik *good governance*, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

- 2) *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
- 3) *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan harus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau.
- 4) *Responsiveness*. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholder.
- 5) *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- 6) *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
- 7) *Effectiveness and efficiency*. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- 8) *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil Society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, misalnya apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.
- 9) *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas, serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Dari karakteristik *good governance* diatas dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan tata pemerintahan yang lebih baik dengan melibatkan tiga aktor penting yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat dengan mengedepankan pelaksanaan yang partisipatif. Pelaksanaan *good governance* juga dilandaskan berdasarkan hukum yang ada, mengedepankan transparansi/keterbukaan, mengedepankan sikap yang cepat dan tanggap untuk melayani berbagai kepentingan agar tercipta keadilan yang merata.

Dalam rangka penyelenggaraan *good governance* ada salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh negara atau pemerintah dalam mengatur sebuah perusahaan yang disebut *good corporate governance* (GCG). *Good Corporate*

Governance yaitu berkaitan dengan manajemen perusahaan dalam menghormati dan mematuhi hak-hak hukum para *stakeholder* sehingga dapat mendorong terciptanya *check and balance* dalam mengakomodasi kepentingan *shareholder* dan *stakeholder*. Perusahaan harus memiliki tata kelola dan hubungan yang baik dengan para *stakeholder* dari dalam maupun luar perusahaan. Hal ini perlu diperhatikan dan dilakukan agar dapat terciptanya suatu iklim bisnis yang sehat yang mana nantinya tidak hanya memberikan kontribusi bagi dunia usaha saja tetapi juga seluruh komponen yang terlibat baik masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu setiap negara dapat menerapkan prinsip GCG agar dapat menarik para investor yang kemudian dapat memberikan kontribusi kepada *stakeholder* lainnya.

4. Good Corporate Governance (GCG)

a) Konsep Good Corporate Governance (GCG)

Sebagai sebuah konsep yang sedang berkembang dan sangat populer di berbagai negara, *Good Corporate Governance* (GCG) mempunyai banyak definisi hal ini dikarenakan banyak lembaga yang mengeluarkan pendapat atau definisi terkait konsep GCG. Menurut Komite Cadbury dalam Daniri (2005:6-7) mendefinisikan GCG adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholder* khususnya, dan *stakeholder* pada umumnya.

Wujud pelaksanaan *good governance* adalah bagaimana ketiga aktor yaitu *public*, *private*, dan *civil society* mendudukan dirinya sesuai dengan kapasitas dan

lingkupnya masing-masing, melakukan sinergi antar mereka, dan semuanya mengarah di dalam rangka mencapai tujuan negara dan masyarakat. Masing-masing aktor mengetahui dengan jelas dan tepat tujuan, peran dan arahnya (*purpose, role, and direction*) dalam wujud keharmonisan di dalam sistem, proses, prosedur, fungsi kestruktur, pengorganisasian, dan etika serta adanya keterkaitan diantara ketiga komponen terset sehingga menghasilkan tata pemerintahan yang baik (*good Governance*) (Utomo, 2006:185).

b) Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Setiap perusahaan sebagai pelaku usaha yang terpenting dalam pembangunan nasional harus memastikan bahwa penerapan GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan yaitu Negara, dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha.

Prinsip dasar menurut Zarkayi (2008:36) yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah :

1. Negara dan perangkat menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan penegakkan hukum secara konsisten (*Consisten Law Enforcement*).
2. Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksana usaha barang dan jasa.

3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial (*social control*) serta objektif dan bertanggung jawab.

Selain itu, GCG memiliki lima prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh setiap perusahaan. Prinsip GCG tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Adapun penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut (KNKG, 2006):

1. Transparansi

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang valid dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok pelaksanaannya adalah

- Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

- Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.
- Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Pedoman pelaksanaannya adalah:

- Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate value*), dan strategi perusahaan.
- Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
- Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
- Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*)
- Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responbilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha di jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. Pedoman pelaksanaannya adalah:

- Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
- Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain. Adapun pedoman pelaksanaannya adalah:

- Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman pokok pelaksanaannya adalah :

- Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
- Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Dengan adanya prinsip *responsibility* menjadikan perusahaan untuk ikut bertanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan sehingga pertumbuhan perekonomian dan pembangunan berkelanjutan dapat berjalan seimbang.

5. *Coorporate Social Responbility* (CSR)

Wahyudi (2011) menjelaskan, CSR adalah sebagai komitmen perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya didasarkan atas keputusan para pemangku

kepentingan dan lingkungan di mana perusahaan melakukan aktivitas operasionalnya. Seluruh program CSR yang dijalankan perusahaan berdasarkan pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. program yang dijalankan bersifat jangka panjang dan berkesinambungan, dalam hal ini perusahaan berupaya menjaga programnya agar tetap berlangsung secara berkelanjutan.

EU Green Paper on CSR mendefinisikan CSR sebagai “ *a concept whereby companies integrate social and enviromental concern in their business operations and in their interactions with their stakeholders on a voluntary basis*” yang artinya “suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan perhatian pada masyarakat dan lingkungan dalam operasi bisnisnya serta dalam interaksinya dengan para pemangku kepentingan secara sukarela.”

Terdapat empat dimensi yang menurut Carroll dalam Solihin (2009:185) mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu:

1. *Economic Responsibilities* (tanggung jawab ekonomi). Tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah tanggung jawab ekonomi karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
2. *Legal Responsibilities* (tanggung jawab hukum). Masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku dimana hukum dan peraturan tersebut pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif. Contoh: taat membayar pajak, taat kepada undang-undang ketenagakerjaan
3. *Ethical Responsibilities*. Masyarakat berharap perusahaan menjalankan bisnis secara etis. Etika bisnis menunjukkan refleksi moral yang dilakukan oleh wirausahawan secara perorangan maupun secara kelembagaan (organisasi) untuk menilai suatu isu dimana penilaian ini merupakan penilaian terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat. Individu atau organisasi

melalui penilaian tersebut, akan memberikan penilaian apakah sesuatu yang dilakukan itu benar atau salah, adil atau tidak adil, serta memiliki kegunaan atau tidak.

4. *Discretionary Responsibility*. Masyarakat mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat. Ekspektasi masyarakat tersebut dipenuhi oleh perusahaan melalui berbagai program yang bersifat filantropis dan dilakukan perusahaan secara sukarela.

Selain itu, menurut Wibisono (2007:32) aspek-aspek yang terdapat dalam

Triple Bottom Line diantaranya :

1. *Profit* (keuntungan). *Profit* merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham tinggi-tingginya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.
2. *People* (masyarakat pemangku kepentingan). Menyadari bahwa masyarakat merupakan stakeholders penting bagi perusahaan, karena dukungan mereka, terutama masyarakat sekitar, sangat diperlukan bagi keberadaan, keberlangsungan hidup, dan perkembangan perusahaan, maka sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat lingkungan, perusahaan perlu berkomitmen untuk berupaya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mereka. Selain itu juga perlu disadari bahwa operasi perusahaan berpotensi memberikan dampak kepada masyarakat. Karenanya pula perusahaan perlu untuk melakukan berbagai kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Intinya, jika ingin eksis dan akseptabel, perusahaan harus menyertakan pula tanggung jawab yang bersifat sosial.
3. *Planet* (lingkungan). jika perusahaan ingin eksis dan akseptabel maka harus disertakan pula tanggung jawab kepada lingkungan. lingkungan adalah sesuatu yang terkait dengan seluruh bidang kehidupan kita. Semua kegiatan yang kita lakukan mulai dari bangun tidur di pagi hari hingga kita terlelap di malam hari berhubungan dengan lingkungan. Air yang kita minum, udara yang kita hirup, seluruh peralatan yang kita gunakan, semuanya berasal dari lingkungan. lingkungan dapat menjadi teman atau musuh kita, tergantung bagaimana kita memperlakukannya.

Adapun manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan CSR menurut

Wibisono (2007:99) diantaranya :

1. Bagi perusahaan, terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh akses terhadap modal (*capital*). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas. Keempat, perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang kritis (*critical decision making*) dan mempermudah pengelolaan manajemen resiko (*risk management*).
2. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai tambah adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja, meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan menghargai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
3. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannya.
4. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut "*corporate misconduct*" atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak digelapkan) oleh perusahaan.

Didalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Dengan demikian perusahaan atau perseroan tidak hanya memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan. Salah satu pembangunan daerah yang memanfaatkan program CSR dari suatu perusahaan adalah pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan.

B. Kerjasama

1. Pengertian Kerjasama

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2003:47), Kerjasama adalah suatu kerja sama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu. Berdasarkan pendapat hafisah (1999:43) menyatakan, kerjasama adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saing membesarkan. Karena merupakan strategi bisnis maka keberhasilan kerjasama sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Lebih lanjut, Anoraga (2002:232), kerjasama merupakan suatu bentuk jalinan kerjasama dari dua atau lebih pelaku usaha yang saling menguntungkan. Terjadinya kerjasama adalah bila ada keinginan yang sama untuk saling mendukung dan saling melengkapi dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Kerjasama memiliki derajat yang berbeda, mulai dari koordinasi kooperasi (*cooperation*) sampai pada derajat yang lebih tinggi yaitu *collaboration*. “Para ahli berpendapat pada dasarnya menyetujui bahwa perbedaan terletak pada kedalaman interaksi, integrasi, komitmen dan kompleksitas dimana *cooperation* terletak pada tingkatan yang paling rendah. Sedangkan *collaboration* pada tingkatan yang paling tinggi” (Thomson dan Perry dalam Keban,2007:28).

Menurut Rosen dalam Keban (2007:32) mengungkapkan “Secara teoritis, istilah kerjasama (*cooperation*) telah lama dikenal dan dikonsepsikan sebagai suatu sumber efisiensi dan kualitas pelayanan. Kerjasama telah dikenal sebagai cara yang jitu untuk mengambil manfaat dari ekonomi skala (*economies of scales*). Pembelajaran atau pembelian bersama misalnya, telah membuktikan keuntungan tersebut, dimana pembelian dalam skala besar atau melebihi “*threshold points*”, akan lebih menguntungkan daripada dalam skala kecil. Dengan kerjasama tersebut biaya *overhead* (*overhead cost*) akan teratasi meskipun dalam skala yang kecil. Sharing dalam investasi misalnya, akan memberikan hasil yang memuaskan dalam penyediaan fasilitas sarana dan prasarana

2. Prinsip Kerjasama

Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2003:72) terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kerjasama oleh masing-masing anggota kerjasama yaitu :

a) Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kerjasama harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

b) Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya

kerjasama sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

c) Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kerjasama memperoleh manfaat dari kerjasama yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

3. Bentuk Perjanjian dan Pengaturan Kerjasama

Kerjasama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk perjanjian dan pengaturan. Seperti yang disebutkan Rosen dalam Keban (2007:33) bahwa bentuk perjanjian (*forms of agreement*) dibedakan atas :

1. *Handshake agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
2. *Written agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Sedangkan pengaturan kerjasama Rosen dalam Keban (2007:33) terdiri atas beberapa bentuk. Diantaranya :

- a. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
- b. *Joint purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
- c. *Equipment sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
- d. *Cooperative construction*, yaitu pengaturan kerjasama dalam mendirikan bangunan.

- e. *Joint services*, yaitu pengaturan kerjasama yang dalam memberikan pelayanan publik.
- f. *Contract services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengkontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
- g. Pengaturan lainnya, pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

C. Stakeholder

1. Pengertian Stakeholder

Definisi Stakeholder menurut Hertifah (2009:29) sebagai “individu, kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang memiliki kepentingan, terlibat atau dipengaruhi (*positive* atau *negative*) oleh suatu kegiatan program pembangunan”. Sedangkan Kuncoro (2005:8) mempertegas pendapat tersebut bahwasannya “*stakeholder* adalah semua individu, kelompok dan organisasi yang mempunyai kepeningan pada kinerja organisasi, termasuk pemilik, karyawan, pemasok, masyarakat umum, dan lain sebagainya. Pengertian *stakeholder* tersebut sesuai dengan pengertian *stakeholder* oleh para ahli yang lain diantaranya dikemukakan oleh : Sceemer (2000) “*Stakeholder in a process are actors (persons or organizaztions) with a vested interest in the policy being promoted*”. Dari aspek semantik, *stakeholder* didefinisikan sebagai perorangan, organisasi, dan sejenisnya yang memiliki andil atau perhatian dalam bisnis atau industri (Hornby yang dikutip oleh iqbal (2007:90). Gonsalves, et al. Yang dikutip iqbal (2007:90) mendeskripsikan *stakeholder* atas “siapa yang memberi dampak dan/atau siapa yang terkena dampak kebijakan, program, dan aktivitas pembangunan. Mereka bisa laki-laki atau perempuan, komunitas, kelompok sosial ekonomi, atau lembaga berbagai dimensi pada setiap tingkat golongan masyarakat”.

2. *Stakeholder dalam governance*

Menurut Minogue, Polidano & Hulme (2000) yang dikutip oleh Islamy (2003:68) “*good governance aims to achieve much more than more efficient management of economic and financial resources, or particularly public services, it is also abroad reform strategy to strenghten the institutions of civil society and make government more open, responsive, acuntable, and democratic*”. Jadi penyelenggaraan pemerintahan yang baik bukan hanya ditujukan untuk dapat mengelola-sumber-sumber ekonomi dan finansial secara efisien, tetapi penyelenggaraan yang baik juga merupakan suatu strategi reformasi yang lebih luas, lembaga-lembaga masyarakat dan juga usaha dalam menjadikan pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, akuntabel, dan demokratis.

Sedangkan menurut Kooiman dan Van Vilet yang di kutip Islamy (2003:70) mengartikan, “konsep *governance* lebih tertuju pada suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diimposisikan keluar, tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak pihak yang ikut terlibat dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain”. UNDP yang dikutip oleh Sedarmayanti (2004:3) mendefinisikan *governance* sebagai “*The exercise of political, economic, dan administrative authority to manage a nation’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integration, and ensure the well being of their population*”. Berdasarkan definisi tersebut, *governance* dapat diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintah dan masyarakat dalam mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik.

3. Identifikasi *stakeholder*

Secara garis besar, *stakeholder* dapat dibedakan atas tiga kelompok hal ini diungkapkan oleh Crosby yang dikutip oleh Iqbal (2007:90), yaitu

- a. Pemangku kepentingan utama (*primary stakeholder*), yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan.
- b. Pemangku kepentingan penunjang (*secondary stakeholder*), adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal
- c. Pemangku kepentingan kunci (*key stakeholder*), yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan.

Dalam proses identifikasi, *stakeholder* kunci harus dikenali sebelum mengidentifikasi *stakeholder* yang lain, Salam dan Noguchi (2006) berpendapat bahwa “*key stakeholders are those who can significantly influence, or are important to the succes of the project. They mentioned that influence is the power that stakeholders have over the project to control what decisions are made, facilities its implementation or exert influence that affect the project negatively*”.

Dari pendapat tersebut dapat diartikan bahwa *stakeholder* kunci adalah mereka yang dapat mempengaruhi secara signifikan, atau penting bagi keberhasilan proyek. Untuk mengontrol keputusan yang dibuat memfasilitasinya dan untuk mengimplementasikannya dibutuhkan kekuasaan, atau kekuasaan juga dapat digunakan untuk mempengaruhi proyek secara negatif.

Berdasarkan analaogi diatas menggambarkan bahwa dalam pengambilan kebijakan, melaksanakan kebijakan maka faktor kekuasaan yang dimiliki

stakeholder menjadi sangat penting. Hal ini memberikan gambaran bahwa dalam mengidentifikasi *stakeholder* membutuhkan atribut-atribut tertentu. Dalam hal ini Bryson (2001) menentukan 2 atribut dalam mengidentifikasi dan kemudian untuk memetakan *stakeholder*, atribut tersebut yaitu *interest* (kepentingan) dan *power* (kekuasaan).

a. *Interest* (kepentingan)

Interest dapat diartikan sebagai minat atau kepentingan dari *stakeholder*, menurut Crosby yang dikutip oleh Iqbal (2007:94) yang dimaksud kepentingan dalam analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) di antaranya terkait dengan harapan, manfaat, sumber daya, komitmen, potensi konflik, dan jalinan hubungan.

b. *Power* (kekuasaan)

Power dapat diartikan sebagai kekuasaan *stakeholder* untuk mempengaruhi atau membuat kebijakan maupun peraturan-peraturan. Crosby yang dikutip oleh Iqbal (2007:94) menyebutkan bahwa yang dimaksud *power* dalam analisis pemangku kepentingan (*stakeholder*) adalah yang berkaitan dengan kekuasaan terhadap kegiatan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap keputusan yang dibuat dan fasilitas pelaksanaan kegiatan sekaligus penanganan dampak negatifnya.

Para *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan memiliki kekuasaan (*power*) serta kepentingan (*interest*) yang beragam. Kepentingan dan kekuasaan dari *stakeholders* yang beragam tersebut perlu dipetakan dengan jelas. Pemetaan *stakeholders* akan membantu pengelola bagaimana melibatkan *stakeholder* tersebut dalam pencapaian tujuan (Wakka, 2014:51).

D. Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*)

Setelah terjadi perkembangan dan pergeseran paradigma pembangunan, munculah paradigma pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan melalui sektor ekonomi, dan sosial, akan tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Mengingat pembangunan tidak hanya pada

sektor ekonomi dan sosial saja, akan tetapi membutuhkan aspek lingkungan yang terjaga. Pembangunan berkelanjutan menurut Asdak (2012:39) yaitu :

“Pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Keambukan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan demikian pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan”.

Martono (1995:2), menyatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang didasari oleh pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dan mempunyai ciri-ciri :

1. Proses pembangunan berlangsung secara berkelanjutan dan didukung oleh sumber dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang;
2. Sumber daya alam terutama udara, air, dan tanah memiliki ambang batas, sehingga pemanfaatan secara berlebihan dapat mengurangi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sehingga mengurangi kemampuannya dalam menopang pembangunan berkelanjutan dan menimbulkan gangguan pada keserasian hubungan manusia dengan alam dan lingkungannya;
3. Kualitas lingkungan berkorelasi langsung dengan kualitas hidup, semakin baik mutu lingkungan semakin positif pengaruhnya pada kualitas hidup, turunya tingkat kematian, dan lain-lain;
4. Pola pembangunan sumber alam tidak menutup kemungkinan memilih peluang lain pada masa depan dalam menggunakan sumber alam;
5. Pembangunan ini memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan meningkatkan kesejahteraannya.

Pembangunan berkelanjutan juga dimaksudkan untuk mengelola pembangunan secara berlanjut dengan dukungan sumber daya yang ada dan berdaya guna serta berkualitas. Dalam arti lain, pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk generasi masa depan. Seperti yang dikemukakan Sugandhy & Hakim (2009:22) bahwa proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan

didukung sumber daya alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkungannya. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kesejahteraannya.

E. Konservasi Hutan Mangrove

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris, *Conservation* yang bermakna “pelestarian atau perlindungan”. Konservasi dalam pengertian sekarang, sering diterjemahkan sebagai *the wise use of nature resources* (pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana). Konservasi juga dapat dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan Hutan konservasi sebagai kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang terdiri dari :

- 1) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan, yang mencakup :

- a) Kawasan cagar alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
- b) Kawasan suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.

Di kedua kawasan tersebut tidak diperbolehkan adanya kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan kawasan kecuali kegiatan-kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.

- 2) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, yang mencakup:

- a) Kawasan taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Umumnya zonasi dapat berupa :

- (i) Zona inti yaitu bagian wilayah taman nasional yang mutlak atau harus dilindungi dan tidak diperbolehkan adanya kegiatan manusia

- (ii) Zona pemanfaatan yaitu zona wilayah yang digunakan untuk kepentingan wisata
 - (iii) zona rimba yaitu zona yang berada diantara areal inti dan areal pemanfaatan yang memungkinkan adanya kegiatan manusia yang menunjang budaya
 - (iv) zona lainnya yaitu zona yang ditetapkan sesuai kepentingan-kepentingan tertentu seperti zona pemanfaatan tradisional, zona pemulihan, zona rehabilitasi, zona pemanfaatan khusus dan lain-lain.
- b) Kawasan taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam dengan tujuan utama untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pariwisata dan rekreasi alam.
- c) Taman Hutan Raya (TAHURA) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi.
- d) Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.

Hutan Mangrove berasal dari kata *mangue/mangal* (Portugis) dan *grove* (Inggris). Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah *tidal forest*, *coastal woodland*, dan *vloedbosschen*. Hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai tipe ekosistem hutan yang tumbuh di daerah batas pasang-surutnya air, tepatnya daerah pantai dan sekitar muara sungai. Tumbuhan tersebut tergenang di saat kondisi air pasang dan bebas dari genangan di saat kondisi air surut. Hutan mangrove merupakan komunitas vegetasi mayoritas pesisir pantai di daerah tropis dan sub tropis yang didominasi oleh tumbuhan mangrove pada daerah pasang

surut pantai berlumpur khususnya di tempat-tempat di mana terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik (Departemen Kehutanan, 2007).

Menurut Davis et al(1995), hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat sebagai berikut :

1) Habitat Satwa Langka

Hutan mangrove sering menjadi habitat jenis-jenis satwa. Lebih dari 100 jenis burung hidup disini, dan daratan lumpur yang luas berbatasan dengan hutan mangrove merupakan tempat mendaratnya ribuan burung pantai ringan migran, termasuk jenis burung langka Blekok Asia (*Limnodrumus semipalmatus*)

2) Pelindung Terhadap Bencana Alam

Vegetasi hutan mangrove dapat melindungi bangunan, tanaman pertanian atau vegetasi alami dari kerusakan akibat badai atau angin yang bermuatan garam melalui proses filtrasi.

3) Pengendapan Lumpur

Sifat fisik tanaman pada hutan mangrove membantu proses pengendapan lumpur. Pengendapan lumpur berhubungan erat dengan penghilangan racun dan unsur hara air, karena bahan-bahan tersebut seringkali terikat pada partikel lumpur. Dengan hutan mangrove, kualitas air laut terjaga dari endapan lumpur erosi.

4) Penambahan Unsur Hara

Sifat fisik hutan mangrove cenderung memperlambat aliran air dan terjadi pengendapan. Seiring dengan proses pengendapan ini terjadi unsur hara yang berasal dari berbagai sumber, termasuk pencucian dari areal pertanian.

5) Penambat Racun

Banyak racun yang memasuki ekosistem perairan dalam keadaan terikat pada permukaan lumpur atau terdapat di antara kisi-kisi molekul partikel tanah air. Beberapa spesies tertentu dalam hutan mangrove bahkan membantu proses penambatan racun secara aktif.

6) Sumber Alam dan Kawasan (*In-Situ*) dan Luar Kawasan (*Ex-Situ*)

Hasil alam in-situ mencakup semua fauna dan hasil pertambangan atau mineral yang dapat dimanfaatkan secara langsung di dalam kawasan. Sedangkan sumber alam ex-situ meliputi produk-produk alamiah di hutan mangrove dan terangkut/berpindah ke tempat lain yang kemudian digunakan oleh masyarakat di daerah tersebut, menjadi sumber makanan bagi organisme lain atau menyediakan fungsi lain seperti menambah luas pantai karena pemindahan pasir dan lumpur.

7) Sumber Plasma Nutfah

Plasma nutfah dari kehidupan liar sangat besar manfaatnya baik bagi perbaikan jenis-jenis satwa komersial maupun untuk memelihara populasi kehidupan liar itu sendiri.

8) Rekreasi dan Pariwisata

Hutan mangrove memiliki nilai estetika, baik dari faktor alamnya maupun dari kehidupan yang ada didalamnya. Hutan mangrove yang telah dikembangkan menjadi obyek wisata alam. Hutan mangrove memberikan obyek wisata yang berbeda dengan obyek wisata alam lainnya. Karakteristik hutannya yang berada di peralihan antara darat dan laut memiliki keunikan dalam beberapa

hal. Para wisatawan juga memperoleh pelajaran tentang lingkungan langsung dari alam. Pantai Padang, Sumatera Barat yang memiliki areal mangrove seluas 43,80 ha dalam kawasan hutan, memiliki peluang untuk dijadikan areal wisata mangrove.

9) Sarana Pendidikan dan Penelitian

Upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membutuhkan laboratorium lapang yang baik untuk kegiatan penelitian dan pendidikan.

10) Memelihara Proses-Proses dan Sistem Alami

Hutan mangrove sangat tinggi peranannya dalam mendukung berlangsungnya proses-proses ekologi, geomorfologi, atau geologi didalamnya.

11) Penyerapan Karbon

Proses fotosintesis mengubah karbon anorganik (CO_2) menjadi karbon organik dalam bentuk bahan vegetasi. Pada sebagian besar ekosistem, bahan ini membusuk dan melepaskan karbon kembali ke atmosfer sebagai CO_2 . Akan tetapi hutan mangrove justru mengandung sejumlah besar bahan organik yang tidak membusuk. Karena itu, hutan mangrove lebih berfungsi sebagai penyerap karbon (carbon sink) dibandingkan dengan sumber karbon (carbon source).

12) Memelihara Iklim Mikro

Evapotranspirasi hutan mangrove mampu menjaga kelembaban dan curah hujan kawasan tersebut, sehingga keseimbangan iklim mikro terjaga.

13) Mencegah Berkembangnya Tanah Sulfat Masam

Keberadaan hutan mangrove dapat mencegah teroksidasinya lapisan pirit dan menghalangi berkembangnya kondisi alam.

Secara garis besar manfaat hutan mangrove dapat dibagi dalam dua bagian

1. Fungsi Ekonomis yang terdiri atas :

a) Hasil berupa kayu (kayu konstruksi, kayu bakar, arang, serpihan kayu untuk bubur kayu, tiang/pancang).

b) Hasil bukan kayu

Hasil hutan ikutan (non kayu) dan Lahan (Ecotourisme dan lahan budidaya).

2. Fungsi ekologi, yang terdiri atas berbagai fungsi perlindungan lingkungan ekosistem daratan dan lautan maupun habitat berbagai jenis fauna, diantaranya:

- a) Sebagai proteksi dan abrasi/erosi, gelombang atau angin kencang.
- b) Pengendalian intrusi air laut.
- c) Habitat berbagai jenis fauna.
- d) Sebagai tempat mencari, memijah dan berkembang biak berbagai jenis ikan dan udang.
- e) Pembangunan lahan melalui proses sedimentasi.
- f) Pengontrol penyakit malaria.
- g) Memelihara kualitas air (mereduksi polutan, pencemar air)

Hasil hutan mangrove non kayu ini sampai dengan sekarang belum banyak dikembangkan di Indonesia. Padahal apabila dikaji dengan baik, potensi sumberdaya hutan mangrove non kayu di Indonesia sangat besar dan dapat mendukung pengelolaan hutan mangrove secara berkelanjutan (Davis et al., 1995).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moleong (2008:6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, dimana peneliti ini menurut Indiarso dan Supomo (1999:26) adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Metode deskriptif juga dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Moleong (2008:11) penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.

Menurut Burhan Bungin (2009:68) tujuan penelitian kualitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Jadi, kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk membuat deskriptif, gambaran, atau sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat situasi, kondisi atau fenomena dengan menggunakan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan objek yang diamati secara utuh.

B. Fokus Penelitian

Fokus pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2005).

Sehubungan dengan pokok masalah yang akan diteliti maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kerjasama antar *stakeholder* dalam mengembangkan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan, meliputi :
 - a. Stakeholder yang terlibat
 - b. Peran Stakeholder
 - c. Bentuk kerjasama
 - d. Program kerjasama

e. Koordinasi

2. Dampak yang dihasilkan dari kegiatan kerjasama *Stakeholder* dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan, meliputi :

- a. Dampak ekonomi
- b. Dampak sosial
- c. Dampak lingkungan

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Didalam melakukan sebuah penelitian haruslah memiliki tempat obyek yang diteliti. Lokasi penelitian adalah tempat seseorang peneliti melakukan penelitian untuk mendapatkan informasi dan data-data yang valid dan akurat yang benar-benar diperlukan untuk kegiatan penelitian dari objek yang diteliti. Adapun lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kota Tarakan karena Kota Tarakan memiliki banyak program kerjasama. Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti meneliti keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data dan untuk lebih spesifiknya, situs dalam penelitian ini adalah Dinas Pariwisata dan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) Kota Tarakan.

D. Sumber data

Menurut Lofland dalam (Moleong, 2000:112), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data-data tersebut adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari sumber-sumber primer, yakni yang asli, informasi dari tangan pertama atau responden. Adapun pihak yang terkait adalah Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan, Kepala seksi pengembangan ODTW Dinas Pariwisata Kota Tarakan, Humas PT. Pertamina Field Kota Tarakan, Humas PT. Mustika Aurora, Pengunjung kawasan KKMB, Petugas KKMB, Pedagang di KKMB.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek kajian yang diteliti namun diusahakan oleh pihak lain antara lain data yang berasal dari dokumen yaitu berbagai dokumentasi yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian berupa Undang-Undang, foto, peraturan daerah, dan lain-lain; jurnal dan buku-buku literatur yang diperoleh dari suatu organisasi atau berasal dari pihak lain yang telah mengumpulkan dan mengolahnya sehingga dapat melengkapi data-data yang digunakan dalam penelitian. proses pengumpulan sumber data dalam penelitian ini haruslah dilakukan dengan relevan agar pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai nantinya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena untuk mencapai sebuah hasil dalam penelitian

dibutuhkan data-data dari fenomena yang diteliti. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpul data dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya. Pada dasarnya teknik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat dilakukan penilaian atas perubahan tersebut (Subagyo, 1991, h.63).

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi (Mardalis, 2008).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis terkait dengan permasalahan yang diteliti.

F. Instrument penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Dalam mendukung proses pengumpulan data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen penelitian berupa:

1. Peneliti sendiri yang merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan karena hanya peneliti yang dapat berhubungan dengan responden atau objek lainnya secara langsung.
2. Pedoman wawancara (*interview Guide*) yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan pada informan. Pedoman wawancara ini digunakan oleh peneliti dalam melakukan wawancara untuk pengumpulan data yang diperlukan sesuai dengan topik yang sedang diteliti.
3. Catatan lapangan yakni instrument ini digunakan oleh peneliti untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, meliputi alat tulis menulis.
4. Dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian ataupun tempat lain, yang berisi data-data pendukung dan dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat tulis menulis, fotocopy dokumentasi, dan pemotretan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan.

G. Metode Analisis

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono (2013:244) merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan Mile, Huberman dan Saldana, karena memberikan sistematika yang sesuai untuk peneliti dalam menganalisis data yang diperoleh. Dalam melakukan analisis data kualitatif, menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dapat melalui alur kegiatan yang meliputi :

1. Kondensasi Data

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang didapat di lapangan. Kondensasi data dilakukan dengan cara data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan disederhanakan, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, fokus, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir bisa ditarik dan diverifikasi.

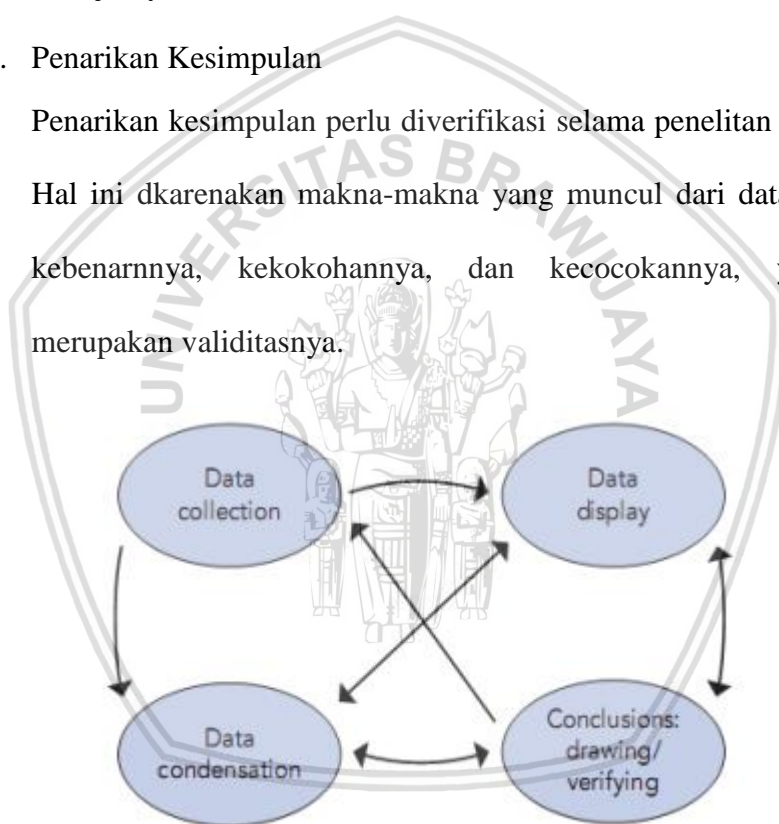
2. Penyajian Data

Penyajian diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan

suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penggunaan berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian merencanakan kerja selanjutnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung. Hal ini dikarenakan makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.



Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif
Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

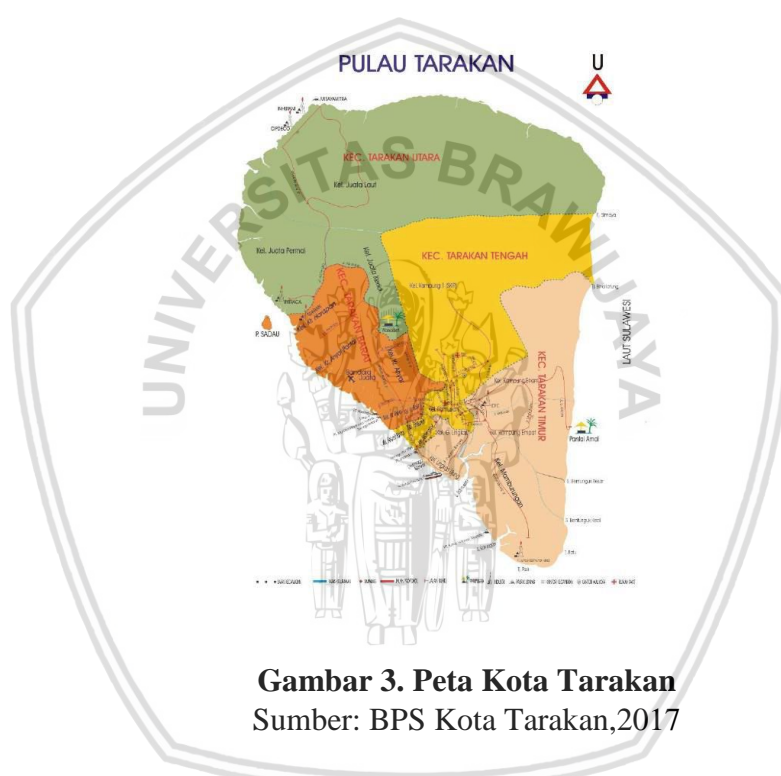
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Tarakan

a. Sejarah Kota Tarakan



Gambar 3. Peta Kota Tarakan
Sumber: BPS Kota Tarakan, 2017

Kota Tarakan merupakan sebuah kota kecil yang terletak di wilayah Kalimantan Utara. Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda di Indonesia yang di resmikan pada tahun 2012 melalui sidang paripurna DPR. Kota Tarakan merupakan salah satu kota penghasil minyak bumi walaupun saat ini hasil minyak bumi yang ada di Kota Tarakan tidak sebanyak jaman dulu. Pada zaman penjajahan terdahulu, Jepang

merupakan negara pernah menjajah Indonesia dan mendarat pertama kalinya di Kota Tarakan.

Kota Tarakan berasal dari bahasa Tidung yaitu “Tarak” (istirahat) dan “ngakan” (makan) yang berarti tempat beristirahat para nelayan untuk makan. Suku asli penduduk Kota Tarakan adalah Suku Tidung. Pemerintahan Kota Tarakan terbentuk pada tahun 1999. Adapun visi Kota Tarakan yaitu mewujudkan Kota Tarakan sebagai kota perdagangan, jasa, industri, perikanan, dan pariwisata, didukung oleh sumber daya manusia serta infrastruktur yang handal dan berwawasan lingkungan. Sedangkan misinya antarlain melaksanakan pengembangan pembangunan kawasan perdagangan, industri, perikanan, dan pariwisata, meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melaksanakan peningkatan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur, melaksanakan pengembangan dan pembangunan lingkungan hidup.



Gambar 4. Logo Kota Tarakan
Sumber: BPS Kota Tarakan, 2017

Lambang Daerah Kota Tarakan mencerminkan Visi, Misi, Kota Tarakan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Arti dan bentuk lambang Kota Tarakan adalah sebagai berikut :

Lambang yang berbentuk perisai yang berarti ketahanan wilayah yang tangguh.

a) Arti warna lambang adalah

- a. Warna biru melambangkan persaudaraan.
- b. Warna hijau melambangkan keagamaan, keluhuran, dan kemashuran.
- c. Warna kuning melambangkan keagungan dan kemashuran.
- d. Warna kuning emas melambangkan keagungan dan kemashuran.
- e. Warna putih melambangkan kesucian.
- f. Warna coklat melambangkan kedamaian/ketentraman.
- g. Warna merah melambangkan dalam kebenaran.

b) Bersudut 5 (lima) melambangkan Dasar Falsafah Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

c) Padi dan kapas melambangkan Pemerintahan yang berkeadilan sosial dan sekaligus pula merupakan rangkaian sejarah terbentuknya Daerah Kota Tarakan yang di resmikan pada tanggal 15 Desember 1997, masing-masing :

- a. Untaian padi sebelah luar berjumlah 15 (lima belas) dan sebelah dalam berjumlah 12 (dua belas) melambangkan tanggal dan bulan peresmian Daerah Kota Tarakan.
- b. Untaian kapas sebelah dalam berjumlah 9 dan sebelah luar 7 butir, melambangkan tahun 1997, tahun peresmian Daerah Kota Tarakan.
- c. Ikatan padi dan kapas berjumlah 7 lilitan, melambangkan bahwa Daerah Kota Tarakan merupakan daerah yang ke 7 di Provinsi Kalimantan Timur serta merupakan ikatan persatuan dan kesatuan.
- d. Tulisan Kota Tarakan menunjukkan wilayah pemerintahan Daerah Kota Tarakan.
- e) Pintu gerbang melambangkan keadaan Daerah Kota Tarakan sebagai kota transit.
- f) Menara minyak dengan semburan gas pada puncaknya melambangkan potensi masa lampau yang memberikan kontribusi pendapatan nasional.
- g) Perisai merupakan alat pelindung untuk mencapai tujuan Negara Republik Indonesia.
- h) Mandau dan Dayung melambangkan kesiapan masyarakat pembangunan.
- i) Guci air yang terletak ditengah perisai melambangkan potensi sumber daya manusia Daerah Kota Tarakan.

- j) Perahu melambangkan Daerah Kota Tarakan merupakan kepulauan yang ditunjang oleh potensi kelautan.
- k) Garis ombak berwarna putih melambangkan ketentraman dan kedamaian yang selalu menaungi seluruh warga Daerah Kota Tarakan.
- l) Tulisan yang ada dalam lambang daerah adalah (Paguntaka) yang berasal dari bahasa Tidung yang berarti “Kampung Kita”.

b. Kondisi Geografis Kota Tarakan

Kota Tarakan merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ± 18 meter diatas permukaan laut, terletak antara $3^{\circ}.19^{\circ} - 3^{\circ}.20^{\circ}$ Lintang Utara dan $117^{\circ}.34^{\circ} - 117^{\circ}.38^{\circ}$ Bujur Timur. Berdasarkan geografisnya, Kota Tarakan memiliki batas-batas diantaranya sebelah utara terdapat pesisir Pantai Kecamatan Pulau Bunyu, sebelah selatan terdapat pesisir Pantai Kecamatan Tanjung Palas, sebelah barat terdapat pesisir Pantai Kecamatan Sesayap, dan sebelah Timur terdapat Kecamatan Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi. Akhir tahun 2016, wilayah administrasi Kota Tarakan terdiri atas 4 kecamatan, dengan luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu Tarakan Timur ($61,44 \text{ km}^2$), Tarakan Tengah ($56,10 \text{ km}^2$), Tarakan Barat ($29,61 \text{ km}^2$) dan Tarakan Utara ($108,10 \text{ km}^2$).

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran Kota Tarakan di masing-masing kecamatan, yaitu Tarakan Timur (12,00 m), Tarakan Tengah (15,00 m), Tarakan Barat (28,00 m), dan Tarakan Utara (17,00 m). Untuk kondisi klimatologi, rata-rata suhu udara di Kota

Tarakan pada tahun 2016 adalah 27,70°C, dengan rata-rata titik maksimal pada 33,40°C dan rata-rata kelembaban udara di Kota Tarakan pada tahun 2016 adalah 84,00 persen dengan rata-rata titik maksimal pada 98,00 persen dan rata-rata titik minimal pada 56,00 persen. Kondisi tekanan udara di Kota Tarakan pada tahun 2016 adalah 1.010,90 mb dengan kecepatan angin 7,00 knot dan penyinaran matahari mencapai 65,50 persen. Untuk kondisi hujan, rata-rata curah hujan di Kota Tarakan pada tahun 2016 adalah 366,60 mm³ dengan rata-rata jumlah hari hujan pada tahun 2016 adalah 23 hari.

c. Pertumbuhan Penduduk kota Tarakan

Penduduk Kota Tarakan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2016 sebanyak 244.185 jiwa yang terdiri atas 127.933 jiwa penduduk laki-laki dan 116.252 jiwa penduduk perempuan. Jika dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2015, penduduk Kota Tarakan mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen dengan masing-masing persentase pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 3,75 persen dan penduduk perempuan sebesar 3,56 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 110,05, yang berarti bahwa di antara 100 penduduk perempuan, terdapat 110 sampai 111 penduduk laki-laki di Kota Tarakan tahun 2016. Kepadatan penduduk di Kota Tarakan tahun 2016 mencapai 974 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 4 kecamatan cukup beragam dengan

kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tarakan Barat dengan kepadatan sebesar 2.923 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Tarakan Utara sebesar 261 jiwa/Km².

Tabel 1. Jumlah pertumbuhan penduduk Kota Tarakan Pada Tahun 2016

	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Tarakan Timur	28,50	25,77	54,27	110,57
2	Tarakan Tengah	39,62	36,92	76,54	107,33
3	Tarakan Barat	44,92	40,63	85,55	110,55
4	Tarakan Utara	14,90	12,93	27,83	115,21
	Tarakan	127,93	116,25	244,19	110,05

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tarakan, 2017

d. Ketenagakerjaan di Kota Tarakan

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Tarakan tahun 2015 berjumlah 166.262 orang, yang terdiri dari 104.368 orang angkatan kerja dan 61.894 orang bukan angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Tarakan tahun 2015 mencapai angka 62,77 persen dan tingkat pengangguran di Kota Tarakan pada tahun 2015 adalah 5,60 persen (5,29 persen laki-laki dan 6,33 persen perempuan). Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, Angkatan Kerja di Kota Tarakan tahun 2015 dengan tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah Sekolah Menengah Atas sebesar 27,96 persen dan 0,66 persen adalah angkatan kerja dengan tingkat pendidikan adalah tidak/belum pernah sekolah. Berdasarkan kelompok umur, sebesar 27,35 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Kota Tarakan

tahun 2015 berada pada kelompok umur 35 – 44 tahun, dan masih ada penduduk usia 65 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu (2,29 persen). Sebesar 61,46 persen penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu di Kota Tarakan tahun 2015 berstatus sebagai buruh/ karyawan/ pegawai, dan sebesar 2,43 persen berstatus sebagai pekerja bebas.

Terkait dengan jumlah sampel Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2016 yang merupakan sumber data indikator ketenagakerjaan tahun 2016 yang hanya mencakup 5.000 blok sensus atau sekitar 50.000 rumah tangga, maka BPS hanya dapat menyajikan data ketenagakerjaan pada tingkat nasional dan provinsi, sehingga data terbaru terkait dengan indikator ketenagakerjaan adalah data tahun 2015. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kota Tarakan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Tarakan pada Tahun 2016 sebesar 2.916 orang dengan peningkatan sebesar 20,05 persen bila dibandingkan dengan tahun 2015. Dari 2.916 orang yang terdaftar sebanyak 613 orang telah ditempatkan bekerja (357 laki-laki dan 256 perempuan). Pada tahun 2016, Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian Kota Tarakan tahunberpendidikan terakhir SMA yaitu sebesar 62,21 persen (1.814 orang) dan yang ditempatkan sebanyak 613 orang.

e. Potensi Pariwisata.

Jumlah wisatawan di Kota Tarakan pada tahun 2012 – 2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, pada tahun 2015 terjadi penurunan jumlah wisatawan di Kota Tarakan, yaitu dari 207.585 wisatawan di tahun 2014 menjadi 196.172 wisatawan di tahun 2015 (penurunan sebesar 5,50 persen). Pada tahun 2016, jumlah wisatawan di Kota Tarakan adalah 205.325 wisatawan. Terjadi peningkatan sebesar 4,67 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (196.172 wisatawan di tahun 2014 menjadi 205.325 wisatawan di tahun 2016). Dari 205.325 wisatawan yang ada di Kota Tarakan pada tahun 2016, 98,90 persen merupakan wisatawan domestik dan 1,1 persen adalah wisatawan mancanegara. Dalam selang waktu 5 tahun terakhir (2012 – 2016), jumlah wisatawan mancanegara terus mengalami penurunan. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan mancanegara di Kota Tarakan adalah 2.634 wisatawan, lalu menurun menjadi 2.263 wisatawan pada tahun 2016 (penurunan sebesar 14,12 persen). Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Tarakan dalam mempromosikan pariwisata yang ada di Kota Tarakan hingga kemancanegara.

Perkembangan pariwisata juga didukung dengan makin meningkatnya jumlah perhotelan yang ada di Kota Tarakan. Perkembangan fasilitas akomodasi di Kota Tarakan cukup signifikan terutama fasilitas penginapan tinggal. Hal ini dikarenakan Kota Tarakan menjadi wilayah transit utama bagi seluruh wilayah di Provinsi

Kalimantan Utara mengingat keberadaan Bandara Juata Tarakan sebagai bandara internasional. Tahun 2015, jumlah hotel di Kota Tarakan sebanyak 35 hotel yang tersebar hanya di tiga kecamatan yang ada di Kota Tarakan. Dari 35 hotel, 54,29 persen hotel berada di Kecamatan Tarakan Barat. Dihat dari jumlah kamar dan tempat tidurnya, pada tahun 2015 terdapat 1.209 kamar dan 1.784 tempat tidur di 35 hotel tersebut. Pada tahun 2015, terdapat satu penambahan hotel bila dibandingkan dengan tahun 2014 di Kota Tarakan (34 hotel pada tahun 2014 menjadi 35 hotel pada tahun 2015). Pertambahan satu hotel di tahun 2015 tersebut berada di Kecamatan Tarakan Tengah, dimana pada tahun 2014, jumlah hotel di Kecamatan Tarakan Tengah adalah 10 hotel, lalu di tahun 2015 bertambah menjadi 11 hotel.

2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Kota Tarakan



Gambar 5. Gedung Gadis/Kantor Dinas Pariwisata Kota Tarakan

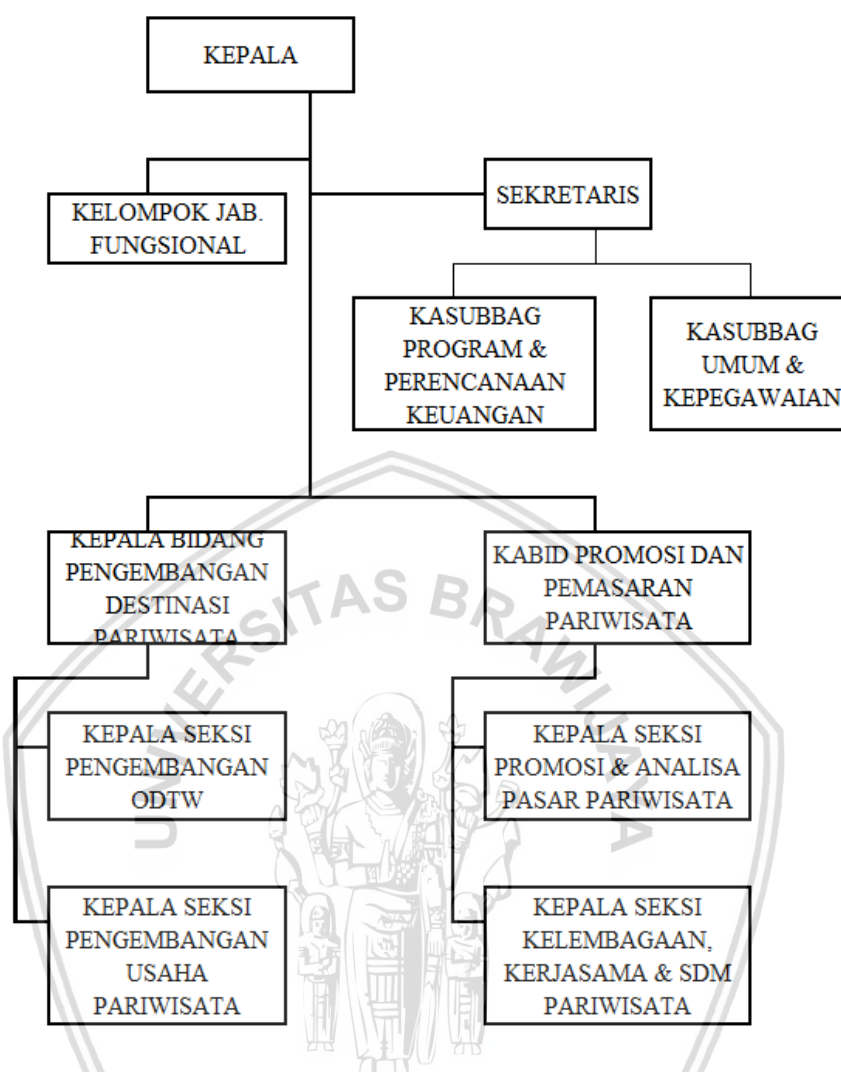
Sumber : www.visit.tarakan.com

Dinas Pariwisata merupakan salah satu satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tupoksi dalam mengelola sektor keparwisataan yang ada di Kota Tarakan. Dinas Pariwisata Kota Tarakan terletak di Jalan Jend.

Sudirman No.76 Kota Tarakan atau tepatnya berada di Gedung Gabungan Dinas 1 Lt. 4. Dinas Pariwisata terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan organisasi dinas daerah Kota Tarakan.

Berbagai destinasi pariwisata yang ada di Kota Tarakan berada dibawah naungan langsung Dinas Pariwisata. Salah satu yang dikelola langsung oleh Dinas Pariwisata adalah Kawasan Ekowisata KKMB (Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan). Selain mengelola kawasan obyek wisata, Dinas Pariwisata juga memiliki kegiatan besar yang dilaksanakan setiap tahunnya dalam rangka memperingati hari jadi Kota Tarakan yaitu Acara Iraw Tengkeyu. Acara tersebut merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan hanya sekali dalam setahun yaitu tepatnya pada bulan desember. kegiatan tersebut dilaksakn di Pantai Amal. kegiatan tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan karena menampilkan berbagai atraksi diantaranya ada tarian massal, pelepasan perahu padaw tuju dulung, dan juga berbagai permainan tradisional yang dapat dicoba oleh seluruh pengunjung.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA KOTA TARAKAN



Gambar 6. Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Tarakan
Sumber : Dokumen Dinas Pariwisata diolah, 2017

3. Gambaran Umum Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan

Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB) merupakan salah satu objek wisata berbasis ekowisata yang ada di Kota Tarakan. letaknya yang berada di pusat kota menjadikan kawasan KKMB sangat mudah untuk dijangkau. Kawasan KKMB pada awalnya hanya berupa kawasan hutan mangrove biasa yang tidak terurus. Kemudian dikembangkan hingga menjadi kawasan ekowisata saat ini oleh

pemerintah daerah Kota Tarakan atas inisiatif mantan Walikota dr. H. Jusuf S.K. Pengelolaan kawasan KKMB saat ini berada dibawah naungan Dinas Pariwisata Kota Tarakan.



Gambar 7. Gerbang masuk kawasan KKMB

Sumber: Dokumen Peneliti, 2017

Kawasan KKMB terdapat berbagai jenis fauna dan berbagai jenis pohon mangrove yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Salah satu daya tarik kawasan KKMB adalah adanya keberadaan satwa endemik Pulau Kalimantan yaitu Bekantan atau monyet hidung panjang (*Nasalis Larvatus*). Selain itu juga kita dapat menemukan beberapa hewan pesisir seperti, biawak, dan berbagai jenis kepiting. Gugusan pohon mangrove juga memberikan suasana yang berbeda bagi pengunjung. Pengunjung tidak hanya menikmati suasananya saja melainkan juga dapat belajar dan mengetahui keberagaman dan juga penting nya ekosistem pesisir seperti kawasan mangrove. Kawasan KKMB juga di lengkapi dengan berbagai macam fasilitas pendukung untuk pengunjung seperti toilet, tempat duduk, kantin, perpustakaan, dan gazebo. Pengunjung yang datang ke Kawasan KKMB tidak hanya berasal dari Kota Tarakan saja melainkan

juga datang dari luar kota bahkan dari luar negeri. Kawasan KKMB juga sering dijadikan sebagai tempat penelitian bagi peneliti baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain.

Kawasan KKMB hingga saat ini masih terus dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk selanjutnya, Pemerintah Daerah akan menambah sarana dan prasarana baru yang belum ada sebelumnya di KKMB seperti wisata perahu dan juga *jogging track*. Diharapkan kedepannya kawasan KKMB tidak hanya dinikmati untuk berwisata saja tetapi juga dapat digunakan untuk berolahraga setiap hari.

B. Penyajian Data

1. Kerjasama antar stakeholder dalam mengembangkan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan

a. Stakeholder Yang Terlibat

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan sumber daya yang dapat terus dinikmati sampai kapanpun. Salah satu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan yaitu pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan (KKMB). Upaya pengembangan dan pembangunan kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Pengembangan kawasan KKMB merupakan bentuk dari pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang terus digencarkan oleh Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kota Tarakan. Pembangunan daerah saat ini tidak

hanya bergantung pada kegiatan ekonomi dan sosial saja melainkan juga akan berpengaruh terhadap lingkungan. Begitu pentingnya konsep pembangunan berkelanjutan karena tujuannya agar setiap pembangunan yang dilakukan tidak menghilangkan sumber daya yang ada sehingga sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan sampai kapan pun.

Kawasan KKMB merupakan kawasan konservasi hutan mangrove dan juga hewan Bekantan serta fauna peisir lainnya yang sedang di rehabilitasi dan terus dibangun dan di kembangkan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan tersebut, Pemerintah Daerah telah melibatkan beberapa *stakeholder* yang terdiri dari Pemerintah, badan usaha dan juga masyarakat.

Terkait dengan *stakeholder*, Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Kawasan KKMB ini pada awalnya hanya kawasan hutan mangrove biasa. Kemudian Pak Walikota saat itu Pak Jusuf berkunjung ke kawasan KKMB. Beliau terkesan dengan keindahan panorama gugusan pohon mangrove sehingga beliau tertarik untuk menjadikan kawasan tersebut menjadi paru-paru kota nantinya. Kemudian Pak Wali saat itu meminta bantuan pembangunan jembatan sementara dari kayu-kayu bekas sisa pembangunan pasar Gusher waktu itu. Sebulan kemudian ketika Pak Walikota datang lagi, ternyata kondisi jembatannya sudah tidak bisa dilewati. Kemudian diambilah langkah dengan mengeluarkan SK tentang pemanfaatan kawasan itu. Denga adanya SK tersebut dimulai lah pembangunan di kawasan KKMB.” (Wawancara di Dinas Pariwisata Kota Tarakan Pada Tanggal 14 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Walikota merupakan *stakeholder* kunci yang berperan menentukan arah kebijakan pengembangan kawasan KKMB. Selain itu, Walikota Tarakan

juga mendorong berbagai pihak untuk berperan aktif dalam pemeliharaan lingkungan khususnya kawasan mangrove.

Walikota Tarakan selaku *stakeholder* kunci tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan tetapi juga memiliki pengaruh yang besar dalam terciptanya KKMB. Penunjukkan pengelolaan saat itu diberikan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan berganti pengelolaan dibawah Dinas Pariwisata.dalam kerjasama pengembangan KKMB terdapat beberapa stakeholder penunjang yang terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, PT. Pertamina, PT. Mustika Aurora. Maka dari itu, diperlukan komitmen bersama yang kuat untuk dapat menciptakan kondisi kerjasama yang baik sehingga pengembangan di kawasan KKMB dapat terus berjalan.

Pengembangan KKMB dimulai sejak Tahun 2001 dengan luas hanya sekitar 3 Ha saja. Kawasan KKMB dulu hanyalah sebuah kawasan mangrove yang hampir hilang akibat pembangunan yang berada di sekitarnya. Setelah dilakukan kunjungan oleh Walikota Tarakan saat itu, kemudian terpikir sekilas untuk menjadikan kawasan mangrove tersebut sebagai paru-paru kota. Kemudian dimulailah pembangunan seperti jembatan dll. Pengembangan dan pembangunan di kawasan KKMB dimulai semenjak diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 591/HK-V/257/2001 tentang pemanfaatan hutan mangrove Kota yang ditujukan untuk kawasan Hutan Mangrove yang berada di Jl. Gajah Mada yang sekarang bernama KKMB

Terkait dengan keberadaan *stakeholder* penunjang dalam kerjasama pengembangan kawasan KKMB, kepala seksi pengembangan obyek dan daya tarik wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Jadi untuk pengelolaannya, kami selalu berkoordinasi dengan berbagai dinas-dinas terkait. Karena memang tidak semua aspek bisa kami kelola misalkan saja seperti aspek lingkungan. Jadi kami berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup. Begitu juga dengan aspek yang lainnya. Oleh karena itu, kami berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk pengembangan kawasan, Kami juga ada kerjasama dengan badan usaha seperti Pertamina.” (wawancara di Dinas Pariwisata pada tanggal 14 Agustus 2017)

Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan menambahkan :

“Adanya kerjasama dengan beberapa pihak ini memang sangat membantu kami sebagai pengelola kawasan KKMB. Karena memang kami memiliki kendala dalam pengelolaan kawasan yaitu soal anggaran. Anggaran kami sangat terbatas yaitu hanya sekitar 200 juta per tahun nya yang kami terima. Sedangkan anggaran tersebut hanya cukup untuk gaji pegawai yang kerja di sana dan juga untuk pakan hewan. Jika ingin membangun fasilitas ya sudah tidak mencukupi lagi anggarannya. Lalu, datanglah bantuan dari PT Pertamina. Dengan adanya bantuan dari PT. Pertamina ini sangat membantu untuk kami. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata Kota Tarakan)

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa Dinas Pariwisata selaku pengelola kawasan KKMB memiliki keterbatasan anggaran jika harus mengembangkan kawasan tersebut lebih jauh. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait untuk meminimalisir anggaran yang keluar terhadap pengelolaan kawasan KKMB. Selain itu, pengembangan kawasan KKMB juga berharap besar terhadap keterlibatan dari pihak ketiga atau investor. Namun, hingga saat ini belum terdapat investor yang bersedia menjadi pengelola maupun

memberikan dana besar untuk pengembangan kawasan KKMB lebih jauh. Seperti yang di katakan Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan:

“Mengenai investor, hingga saat ini memang belum ada yang bersedia. Tetapi kami terus berusaha mencarikannya. Meskipun belum ada investor yang tertarik, tetapi kami masih terus berusaha selalu mengembangkan kawasan KKMB ini dengan anggaran yang seminim mungkin.” (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata Kota Tarakan)

Belum adanya investor yang bersedia memberikan asupan dana besar, tidak membuat Dinas Pariwisata berhenti mengembangkan kawasan tersebut. Untuk meminimalisir anggaran yang keluar, Dinas Pariwisata selalu melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait. Dinas-dinas tersebut terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan SDA, Dinas Kehutanan, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum. Selain itu, mengenai pengembangan kawasan KKMB, Dinas Pariwisata dibantu oleh PT. Pertamina EP dan bekerjasama dengan PT. Mustika Aurora.

PT. Pertamina dan PT Mustika Aurora merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya sehingga memiliki pengaruh terhadap sektor lingkungan. PT Pertamina EP merupakan anak perusahaan tambang minyak milik negara yaitu PT. Pertamina yang memiliki program kerja terhadap pelestarian lingkungan yaitu program keanekaragaman hayati. Program keanekaragaman hayati merupakan program tanggung jawab perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. PT.

Pertamina diberbagai daerah telah menjalankan program tersebut tak terkecuali di Kota Tarakan.

Terkait dengan keterlibatan PT. Pertamina dalam pengembangan kawasan, Kepala bidang Hubungan Masyarakat PT. Pertamina EP Kota Tarakan mengatakan:

“Jadi kami memang setiap tahunnya itu ada kerjasama dengan Pemkot Tarakan melalui program CSR khususnya di bidang pelestarian lingkungan. Karena memang kami punya program kerja CSR yaitu keanekaragaman hayati. Program tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan hidup. Untuk pelaksanaannya kita sering melakukan penanaman pohon di berbagai wilayah dan juga pembangunan infrastruktur salah satunya itu di kawasan KKMB itu.. (Wawancara via Telepon pada tanggal 5 September 2017)

PT. Pertamina EP memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan sehingga di dalam perusahaan tersebut terdapat program keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari program tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. PT. Pertamina mulai fokus memberikan bantuannya sejak tahun 2013 yang dimulai dengan pembangunan jalan penghubung di kawasan KKMB dan juga jalan bagi hewan Bekantan.

Badan usaha lain yang aktif berpartisipasi terhadap pengembangan kawasan KKMB Yaitu PT. Mustika Aurora. PT. Mustika Aurora merupakan badan usaha swasta yang bergerak dibidang pengolahan udang dan terkemuka di Indonesia. Dalam pelaksana tanggung jawab sosial perusahaan, PT. Mustika Aurora memiliki komitmen terhadap pelestarian

lingkungan khususnya konservasi mangrove. Kepala Bidang Humas PT Mustika Aurora mengatakan:

“PT. Mustika Aurora itu punya misi yaitu membangun masyarakat melalui tanggung jawab sosial. Nah salah satunya yaitu melalui konservasi mangrove itu. Jadi kami ingin menyadarkan masyarakat mengingat betapa pentingnya keberadaan mangrove. Sehingga kami berkomitmen untuk menjadi pelopor bagi organisasi yang lain untuk ikut peduli terhadap lingkungan khususnya.” (wawancara Via telepon pada tanggal 5 September 2017)

Komitmen yang kuat dari PT. Mustika Aurora terhadap pelestarian lingkungan juga ditunjukkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Tarakan dan lembaga WWF-Indonesia. MoU tersebut merupakan kerjasama antar 3 sektor dalam pengembangan kawasan. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dengan PT. Mustika Aurora dimulai sejak tahun 2006 hingga saat ini. Oleh karena itu, diharapkan kontribusi berbagai badan usaha dapat memotivasi badan usaha yang lain untuk ikut peduli terhadap pembangunan lingkungan.

Pemerintah Kota Tarakan juga mengharapkan dukungan dari seluruh pihak tidak hanya dari badan usaha saja melainkan juga dari masyarakat. Dalam pengembangan kawasan KKMB, Pemerintah Kota Tarakan juga mengharapkan dukungan dari seluruh masyarakat agar keberadaan kawasan KKMB tersebut tetap terjaga dengan baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tarakan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya keberadaan kawasan mangrove untuk kawasan pesisir. Seperti

yang dikatakan kepala seksi pengembangan obyek dan daya tarik wisata

Dinas Pariwisata Kota Tarakan:

“Jadi yang kita libatkan itu tidak hanya dari perusahaan dan SKPD aja. Kita juga libatkan masyarakat tapi dalam bentuk yang berbeda. Kita selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal disekitar kawasan. Sosialisasi itu juga merupakan arahan dari pak wali. Karena beliau ingin pengembangan kawasan ini ikut didukung oleh masyarakat. Sehingga pengembangan ini bisa berhasil. Karena juga nantinya yang menikmati hasilnya juga masyarakat itu sendiri dan syukur alhamdulillah, banyak masyarakat yang sadar dan ikut mendukung pengembangan kawasan mangrove itu”(wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata).

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa keberadaan masyarakat didalam pengembangan kawasan KKMB tidak hanya sebagai *stakeholder* penunjang saja melainkan juga sebagai *stakeholder* utama. Karena pada dasarnya bahwa Kawasan KKMB tidak hanya sebagai kawasan konservasi tetapi juga dijadikan sebagai kawasan ekowisata dimana kawasan tersebut menjadi area untuk aktivitas wisata bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan yang datang dari luar kota.

Oleh karena itu, Dalam pengembangan kawasan khususnya kawasan mangrove sudah seharusnya mendapatkan dukungan dari semua pihak. Hal tersebut merupakan aspek terpenting dalam percepatan pembangunan kawasan khususnya pembangunan di Kawasan KKMB. Dalam hal ini, terkait dengan pengembangan Kawasan KKMB dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah telah melibatkan seluruh pihak untuk mendukung segala kegiatan pengembangan sehingga telah menjadikan

Kawasan KKMB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Tarakan.

b.Peran Stakeholder

Kawasan KKMB merupakan kawasan konservasi dan telah menjadi kawasan ekowisata dikelola dan dikembangkan dengan baik oleh Pemerintah Daerah. Pengembangan kawasan KKMB telah melibatkan berbagai sektor diantaranya Pemerintah, Badan Usaha dan juga Masyarakat. Dalam pengembangan kawasan KKMB, Pemerintah dalam hal ini terdiri dari Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. Sedangkan badan usaha terdiri dari PT. Pertamina EP. Dan PT. Mustika Aurora. Adapun peran dari berbagai aktor antara lain:

1.Pemerintah Daerah

a) Dinas Pariwisata

Dinas Pariwisata merupakan instansi pemerintahan yang memiliki tupoksi terhadap pengelolaan keparwisataan yang ada di Kota Tarakan. Berbagai destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Tarakan berada dibawah pengelolaan langsung Dinas Pariwisata. Terkait dengan peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan kawasan, Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Pengelolaan kawasan KKMB ini kan dulunya dipegang Dinas Lingkungan Hidup. kemudian karena KKMB sekarang sudah menjadi kawasan wisata jadi pengelolaannya diserahkan ke kami. Itu ada SK penunjukannya kok. Meskipun pengelolaannya berada di kami tetapi kami tidak sendiri

kerjanya. Kami dibantu oleh dinas-dinas terkait. Sebenarnya kawasan KKMB itu semua dinas itu ikut mengelola kok. Hanya saja pengelolaannya yang sah ada di kami di Dinas Pariwisata. Jadi kami hanya berkoordinasi dengan mereka dinas-dinas terkait.”(wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Pariwisata memiliki peran sebagai pengelola utama kawasan KKMB. hal ini berdasarkan SK yang dikeluarkan Walikota Nomor 552/HK-IX/741/2010 tentang Penunjukkan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Tarakan (sekarang menjadi Dinas Pariwisata) sebagai pengelola Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan telah memperkuat status pengelolaan kawasan KKMB. Kawasan KKMB merupakan salah satu destinasi pariwisata yang ada di Kota Tarakan. Oleh karena itu, penunjukkan Dinas Pariwisata sebagai pengelola kawasan KKMB dianggap sesuai dengan tupoksinya yaitu penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Tarakan. Diharapkan dengan keberadaan kawasan KKMB di bawah naungan Dinas Pariwisata dapat meningkatkan daya tarik pariwisata di kawasan KKMB.

b) Dinas Lingkungan Hidup

Salah satu SKPD yang berkoordinasi dengan pengelola kawasan KKMB yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Tupoksinya yaitu sebagai pelaksana pemerintah di bidang pengendalian lingkungan dan sumber daya alam di rasa perlu untuk melakukan pengendalian dan juga pengawasan lingkungan pada kawasan KKMB. Oleh karena itu, dalam pengembangan kawasan KKMB tersebut, Dinas Lingkungan Hidup

merupakan pihak yang berperan terhadap pengawasan lingkungan di kawasan KKMB. Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan yang mengatakan:

“Dalam pengelolaan kawasan KKMB, tugas dari Dinas Lingkungan Hidup ialah mengawasi serta mengendalikan dampak lingkungannya. Jadi setiap bulannya, mereka melakukan pemantauan di kawasan KKMB. tujuannya agar ketika terjadi pencemaran lingkungan dapat diatasi dengan cepat sehingga tidak samapi terjadi kerusakan yang parah. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan menambahkan:

“Meskipun pengelolaan KKMB itu sudah berada dibawah naungan Dinas Pariwisata tetapi bukan berarti kami lepas tangan. Malah kami tetap memilki peran didalamnya. Peran kami disana adalah membantu Dinas Pariwisata untuk mengawasi lingkungan yang ada disana. Untuk meminimalkan kerusakan lingkungan maka kami harus terlibat langsung didalamnya.” (Wawancara pada tanggal 15 agustus di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Kota Tarakan)

Dinas Lingkungan Hidup dan Sumber daya alam memiliki peran yang penting terhadap pengembangan kawasan KKMB. Pengawasan lingkungan tentu menjadi prioritas agar kerusakan lingkungan tidak terjadi di kawasan KKMB. Untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kerusakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan terus berupaya menjaga serta mengawasi bahkan juga ikut mengembangkan kawasan melalui kerjasama seperti penanaman bibit pohon mangrove. Tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan jumlah pertumbuhan kawasan mangrove di Kota Tarakan.

2. Badan Usaha

a) PT. Pertamina EP Tarakan

PT. Pertamina EP merupakan salah satu badan usaha yang aktif setiap tahunnya menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. PT. Pertamina EP merupakan anak perusahaan dari PT. Pertamina yang memiliki wilayah kerja di Kota Tarakan. PT. Pertamina EP memiliki berbagai program sosial dan lingkungan yang tiap tahunnya dilaksanakan di berbagai wilayah di Kota Tarakan. Salah satu programnya adalah keanekaragaman hayati yaitu sebuah program sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan serta sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai badan usaha. Dalam kerjasama pengembangan kawasan KKMB, Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Wisata Kota Tarakan mengatakan:

“Kerjasama yang dilakukan dengan PT. Pertamina itu hanya melalui bantuan CSR saja. Jadi setiap tahunnya mereka memberikan berbagai macam bantuan seperti pembangunan sarana dan prasarana. (wawancara pada tanggal 14 agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Humas PT. Pertamina Field Tarakan menambahkan :

“kegiatan CSR ini merupakan bentuk dari tanggung jawab kami terhadap lingkungan. Setiap tahunnya kami melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang salah satunya yang dilakukan di bidang lingkungan. (Wawancara pada tanggal 5 September 2017 di Kantor PT. Pertamina Field Tarakan)

Berdasarkan wawancara di atas, diketahui bahwa PT. Pertamina EP memiliki peran sebagai pemberi dana untuk pembangunan di kawasan KKMB. PT. Pertamina EP Tarakan sangat rutin memberikan bantuan pembangunan infrastruktur di kawasan KKMB. Keberadaan

PT. Pertamina EP Tarakan sangat membantu Pemerintah Kota Tarakan yang memiliki keterbatasan anggaran dalam mengembangkan kawasan KKMB.

b) PT. Mustika Aurora

Peraturan pemerintah tentang badan usaha yang bergerak di bidang pengelolaan sumber daya alam maka mewajibkan setiap badan usaha tersebut untuk ikut berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan telah di atur didalam Undang-undang no 47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Terkait dengan Undang-undang tersebut, maka PT. Mustika Aurora merupakan badan usaha milik swasta yang wajib berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. PT. Mustika Minanusa Aurora merupakan perusahaan swasta yang bergerak dibidang pengolahan hasil laut. Perusahaan yang berdiri sejak tahun 1995 tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap perekonomian saja melainkan juga terhadap pelestarian lingkungan. Seperti yang di jelaskan oleh Humas PT. Mustika Minanusa Aurora:

“kami tidak ingin hanya bekerja hanya mengejar keuntungan saja tetapi kami juga perlu untuk memperhatikan faktor lingkungan juga. Makanya kami ikut terjun membantu Pemerintah Kota Tarakan untuk mengembangkan kawasan KKMB. Kami berupaya untuk selalu ikut berkontribusi disetiap kegiatan yang tujuannya untuk melestarikan lingkungan. (Wawancara pada tanggal 5 September 2017 via telepon)

Terkait kerjasama dengan Pemerintah Kota Tarakan, Kepala Bagian Pengembangan Kawasan Wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“kami sangat menyambut baik atas inisiatif dari berbagai perusahaan yang ikut membantu kami dalam pengembangan kawasan KKMB ini. Meskipun kerjasama yang dilakukan antara satu dengan yang lainnya berbeda tetapi tetap saja itu sangat membantu kami. Dengan PT. MMA ini, mereka sering memberikan bantuan bibit pohon mangrove setiap tahunnya untuk di tanam di kawasan KKMB. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata Kota Tarakan)

Peranan sektor swasta dalam pengembangan kawasan KKMB

tentunya sangat membantu pemerintah dalam hal ini Dinas Pariwisata yang memiliki keterbatasan anggaran untuk mengembangkan kawasan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa PT. Mustika Aurora merupakan perusahaan swasta yang menjalankan tanggungjawab perusahaan dengan baik dengan ikut berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan. Maka dari itu, kerjasama antara Pemerintah Kota Tarakan dengan PT. Mustika Minanusa Aurora diharapkan dapat terus berjalan dalam jangka waktu yang panjang.

3. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini merupakan penduduk yang tinggal disekitar wilayah kawasan KKMB. Masyarakat merupakan salah satu aktor yang memiliki peranan penting terhadap pengembangan kawasan. Terkait dengan peran masyarakat, Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Karena kita tidak ingin terjadinya crash diantara pemerintah dan masyarakat jadi kita merangkul semua untuk bersama-sama membangun kawasan KKMB. Kita bisa liat di beberapa daerah bahkan terdapat masalah yang terjadi seperti gesekan antara pengelola dengan warga sekitar. nah itu yang kita tidak inginkan. Karena kami tidak ingin terjadi seperti itu jadi ya kami libatkan masyarakat dalam hal pengembangan kawasan. Melibatkannya

seperti apa, ya dengan berbagai program salah satunya yaitu pendidikan melalui sosialisasi. Sosialisasi itu sering kami lakukan kami lakukan hingga saat ini. Bahkan juga kami sering mengajak masyarakat untuk ikut disetiap kegiatan penanaman pohon mangrove yang dilakukan di kawasan KKMB bahkan juga di seluruh daerah Kota Tarakan. Nantinya juga kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai pelatihan UMKM seperti pelatihan pembuatan souvenir yang dibuat dari hasil hutan mangrove. Karena memang saat ini belum terdapat pusat oleh-oleh di kawasan KKMB. sehingga kami merencanakan kedepannya seperti itu. Kami merencanakannya tahun depan untuk pelatihan itu. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Berdasarkan penjelasan dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa masyarakat memiliki peran yang penting karena akan memberikan dampak langsung bagi kelancaraan pembangunan kawasan. Sosialisasi yang di jalankan oleh pemerintah daerah telah membuat masyarakat menjadi pintar terhadap pentingnya keberadaan ekosistem pesisir khususnya kawasan mangrove. Oleh karena itu, dengan adanya sosialisasi tersebut, hingga saat ini banyak masyarakat yang aktif berpartisipasi melakukan kegiatan penanaman pohon mangrove di kawasan KKMB bahkan di daerah-daerah lainnya. Hal ini merupakan dampak yang baik bagi perkembangan kawasan KKMB dan juga perkembangan kawasan mangrove di Kota Tarakan.

Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan serta pengembangan di daerah tiak hanya dilakukan oleh Pemerintah daerah itu sendiri. Perlu adanya kerjasama yang melibatkan berbagai aktor baik dari badan usaha hingga masyarakat setempat. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Tarakan sejak awal pengmbangan

kawasan KKMB telah melibatkan berbagai aktor mulai dari badan usaha hingga masyarakat. Berikut ini merupakan gambaran peranan seluruh stakeholder terhadap kegiatan pengembangan kawasan KKMB:

Tabel. Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan

Stakeholder yang terlibat	Kepentingan Stakeholder	Peran Stakeholder
Dinas Pariwisata	Menyelenggarakan kegiatan kepariwisataan di kawasan KKMB	Mengelola kawasan KKMB sebagai daerah tujuan wisata. Memfasilitasi seluruh stakeholder terhadap kegiatan pengembangan kawasan KKMB.
Dinas Lingkungan Hidup	Mengelola ekosistem fauna dan flora yang hidup dan berkembang di kawasan KKMB	Membantu Dinas Pariwisata mengelola dan mengawasi habitat mangrove di kawasan KKMB
PT. Pertamina Field	Menyelenggarakan kegiatan sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan	Memberikan bantuan berupa pembangunan sarana dan prasarana serta bantuan berupa bibit pohon mangrove.
PT. Mustika Aurora	Menyelenggarakan kegiatan sosial perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan	Memberikan bantuan berupa bibit pohon mangrove
Masyarakat/Penduduk	Penerima dampak dari pengembangan kawasan	Mendukung pengembangan kawasan KKMB

Sumber: Olahan Hasil Penelitian

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa peran dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pariwisata sebagai fasilitator bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat. Sebagai fasilitator, Dinas Pariwisata memfasilitasi bagi *stakeholder* yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab perusahaannya. Kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dengan badan usaha dilakukan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR merupakan salah satu cara bisnis bagi

perusahaan untuk tetap mempertahankan keberadaan perusahaan itu sendiri agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Kerjasama melalui kegiatan CSR perlu adanya kesepakatan yang jelas agar tidak terjadinya penyimpangan anggaran. Kegiatan CSR merupakan kegiatan yang positif bagi perusahaan karena penggunaan anggaran yang langsung pada tepat sasaran. Namun, penyelenggaraan CSR bisa saja menjadi masalah ketika perusahaan yang melaksanakan kegiatan CSR mengambil keuntungan dalam arti adanya permintaan bagi hasil di dalam kegiatan tersebut. Karena pada dasarnya, pelaksanaan CSR merupakan sebuah tanggung jawab yang dilakukan secara sukarela. Artinya tidak terdapat istilah “bagi hasil” ataupun “bagi keuntungan” bagi siapapun didalamnya.

Badan usaha juga memberikan peranan yang begitu penting di dalam keberhasilan pengembangan kawasan KKMB. Keaktifan badan usaha dalam kegiatan konservasi telah membantu Pemerintah Kota Tarakan sebagai pengelola utama kawasan dalam berbagai hal. Salah satu yang sangat berpengaruh adalah mengenai asupan anggaran yang diberikan oleh badan usaha kepada pemerintah untuk melaksanakan pengembangan kawasan KKMB. Ini merupakan angin segar bagi pemerintah yang mengalami keterbatasan anggaran mengenai pengembangan kawasan KKMB. Masyarakat merupakan stakeholder yang sama memiliki peranan yang penting terhadap pengembangan kawasan KKMB. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari seluruh masyarakat Kota Tarakan maka dapat dipastikan bahwa pengembangan kawasan KKMB tersebut tidak dapat

berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pengembangan kawasan KKMB tentulah harus didukung oleh seluruh pihak agar keberhasilan pengembangan kawasan KKMB dapat memberikan manfaat yang baik bagi seluruh masyarakat.

c. Bentuk Kerjasama

Dalam upaya pengembangan kawasan melalui kerjasama tentunya bertujuan untuk percepatan pembangunan. Terkait dengan bentuk kerjasama pengembangan kawasan KKMB, Kepala Bagian Pengembangan Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Memang kendala di kami itu mengenai anggaran. Tapi kita berupaya mencari jalan lain yaitu dengan mencari bantuan ke berbagai perusahaan. Syukur alhamdulillah ada beberapa perusahaan yang mau membantu. Ada dari PT. Pertamina memberikan bantuannya itu berupa pembangunan berbagai sarana dan prasarana baru. Itu semua merupakan bentuk kegiatan CSR mereka. Tapi kalo pembangunan sarana dan prasarana itu tidak ada MoU-nya. Karena mereka kan hanya memberikan bantuan lewat program CSR mereka. kemudian ada kerjasama dengan PT. Mustika Aurora. Kalau dengan mereka baru ada MoU-nya. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Dalam kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dengan badan usaha, terdapat 2 (Dua) bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan. Pertama, kerjasama melalui program tanggung jawab social atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di bidang lingkungan. Dalam hal ini, PT. Pertamina memberikan bantuan CSR mereka kepada Pemerintah Kota Tarakan yang di wakili oleh Dinas Pariwisata Kota Tarakan. Kegiatan tersebut rutin dilaksanakan oleh PT. Pertamina EP

Kota Tarakan setiap tahunnya mulai tahun 2013 di kawasan KKMB. Bantuan-bantuan program CSR yang dilakukan oleh PT. Pertamina EP setiap tahunnya berfokus pada pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan maupun yang sudah rusak.

Kedua, pelaksanaan kerjasama atas dasar nota kesepakatan atau MoU. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tarakan melakukan kerjasama dengan PT. Mustika Aurora dan melakukan kesepakatan secara tertulis terhadap kerjasama pengembangan kawasan KKMB. Kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dan PT. Mustika Aurora. Kerjasama tersebut dimulai pada tahun 2006. Pada saat itu, Pemerintah Kota Tarakan dan PT. Mustika Aurora bekerjasama dalam melakukan pengembangan kawasan KKMB seluas 12 Ha hingga tahun 2010. Meskipun kegiatan tersebut telah terlaksana, kerjasama tersebut masih terus berjalan hingga saat ini. Bahkan, kerjasama tersebut berlanjut dalam pengembangan kawasan KKMB 2.

Jadi, Pemerintah Kota Tarakan dalam mengembangkan kawasan KKMB mengandalkan bantuan-bantuan dari kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dengan badan usaha yang terlibat. Sehingga pengembangan kawasan KKMB dapat terus berjalan.

d. Program Kerjasama

Berbagai infrastruktur di kawasan KKMB telah dibangun hingga saat ini. Pembangunan infrastruktur tersebut merupakan hasil kerjasama melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan juga melalui

MoU. Terdapat 2 jenis kerjasama yang dilakukan oleh para *stakeholder* diantaranya kerjasama dibidang konservasi mangrove dan kerjasama di bidang pembangunan infrastruktur. Kerjasama antara Pemerintah Kota Tarakan dengan PT. Pertamina dalam bidang pembangunan infrastruktur meliputi:

1) Jembatan dan jalan khusus Bekantan

Jembatan merupakan salah satu sarana penting yang perlu dibangun di kawasan mangrove. Keberadaan jembatan dikawasan mangrove dapat membuat pengawasan serta pengelolaan kawasan mangrove menjadi lebih mudah untuk dilakukan. Begitu pun yang terjadi pada Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan Kota Tarakan. Jembatan merupakan infrastruktur yang paling penting untuk di bangun di Kawasan KKMB. Karena pada dasarnya jembatan merupakan sarana yang digunakan untuk pengelolaan seperti pemberian makan hewan serta pengawasan lingkungan dan juga dapat digunakan pengunjung untuk menikmati kawasan dengan cara berkelilingi kawasan.



Gambar 9. Jembatan Pejalan Kaki

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017

Pembangunan jembatan di kawasan KKMB sudah dilakukan sejak awal proses pembangunan kawasan dilakukan. Jembatan yang dibangun di Kawasan KKMB merupakan sebagian hasil kerjasama dengan PT. Pertamina EP. Pada tahun 2013, PT. Pertamina memberikan bantuan berupa pembangunan jembatan penghubung sepanjang 120 meter di kawasan KKMB. Terkait keberadaan jembatan, Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Jembatan-jembatan itu kan banyak yang terbuat dari kayu. Jadinya gak bisa tahan lama dan harus terus diperbarui. Untungnya dengan adanya program CSR dari PT. Pertamina tersebut, sangat membantu kami sehingga bisa bangun kembali beberapa bagian dari jembatan yang sudah mulai rusak. kan kalo jembatannya rusak yang jadi nda nyaman kan pengunjungnya. Nah itu yang kita hindari dan kita terus perbaiki jembatannya. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Selain pembangunan jembatan bagi pengunjung, kerjasama pembangunan jalan bagi monyet bekantan juga dilakukan. Kerjasama pembangunan jalan tersebut dilakukan pada tahun 2013.



Gambar 10. Pembangunan jalan Bekantan

Sumber: aniessagustravelblog.wordpress.com. 2014

2) Ruang Informasi

Ruang informasi merupakan sarana pendukung atau sebagai tempat untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan kawasan KKMB. Ruang informasi dibangun pada tahun 2010 oleh Pemerintah Kota Tarakan. Kondisi ruang informasi yang semakin rusak sehingga tahun 2017 telah dilakukan renovasi bangunan. Pembangunan ruang informasi tersebut merupakan kerjasama dari PT. Pertamina EP melalui bantuan program CSR. Dengan adanya ruang informasi yang layak pakai, diharapkan kinerja petugas lapangan dapat terus meningkat serta dapat selalu memberikan informasi tentang kawasan KKMB. Terkait dengan kerjasama pembangunan ruang informasi, Kepala Seksi Pengembangan ODTW Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Untuk tahun ini, bantuan yang di berikan oleh PT. Pertamina itu berupa pembangunan ruang informasi. Jadi, kondisi ruang informasi disana itu kan sudah tidak layak pakai. Jadinya kami mengajukan itu ke PT. Pertamina kemudian direnovasilah oleh mereka. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

3) Rumah Karantina Hewan



Gambar 11. Rumah Karantina Hewan

Sumber: dherdian.wordpress.com. 2014

Rumah Karantina Hewan merupakan sebuah tempat yang dimanfaatkan untuk keperluan merawat atau merehabilitasi hewan yang sedang sakit ataupun yang akan di lepas liarkan di Kawasan KKMB. Pembangunan Rumah Karantina dilakukan pada tahun 2010. Pembangunan tersebut merupakan kerjasama dari bantuan CSR dari PT. Pertamina EP Tarakan. Kepala pengembangan daya tarik wisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Pembangunan Rumah karantina tersebut merupakan bantuan dari PT. Pertamina Field. Karena rumah tersebut salah satu kebutuhan dalam pengelolaan kawasan KKMB. Sehingga yang kami ajukan saat itu ya pembangunan rumah karantina tersebut.”(Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata Kota Tarakan)

4) Tempat Sampah



Gambar 12. Tempat Sampah

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2017

Kebersihan lingkungan merupakan faktor penting untuk tetap terjaganya kelestarian lingkungan di Kawasan KKMB. Salah satu program yang dilakukan yaitu penyediaan bak sampah di sepanjang jalur penjalan kaki. Diharapkan dengan adanya ketersediaan bak sampah di sepanjang

jalur jalan kaki dapat meningkatkan kesadaran pengunjung terhadap kebersihan dikawasan tersebut. Bantuan tempat sampah sudah dilakukan sejak tahun 2012 hingga saat ini.

5) Tempat Makan Bekantan

Tempat makan bekantan merupakan tempat khusus yang disediakan dan berfungsi sebagai tempat berkumpulnya hewan bekantan pada jam-jam makan Bekantan. Pembangunan tempat makan bekantan melalui kerjasama dengan PT. Pertamina EP Tarakan dilakukan pada tahun 2014. Dalam kerjasama tersebut, di bangun 2 tempat khusus makan bagi para bekantan. Keberadaan tempat makan khusus bekantan menjadi tempat kumpul para bekantan di saat jam makan tiba sehingga waktu itulah kesempatan bagi para pengunjung untuk dapat melihat belasan ekor bekantan yang sedang berkumpul.

6) Rumah Karantina Hewan

Bentuk kerjasama yang kedua yaitu kerjasama yang dilakukan di bidang pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, kerjasama dilakukan bersama dengan PT. Mustika Aurora dan PT. Pertamina EP Tarakan. kerjasama tersebut berupa penanaman bibit pohon mangrove yang dilakukan di Kawasan KKMB bahkan juga dilakukan di berbagai kawasan pesisir Kota Tarakan. Terkait dengan bentuk kerjasama yang dilakukan, Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Kerjasama yang dilakukan itu bermacam-macam ada yang pembangunan sarana dan prasarana, ada juga yang bekerjasama di bidang konservasi. Contohnya kerjasama dengan PT. Mustika Aurora. Mereka hanya membantu di bidang pelestarian lingkungan saja seperti penanaman bibit pohon mangrove. Berbeda dengan PT. Pertamina EP yang memberikan bantuan berupa pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana dan juga ikut melakukan penanaman bibit pohon mangrove. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Pada tahun 2013 dan 2014, PT Pertamina EP telah memberikan bantuan sebanyak 10.000 bibit pohon mangrove pertahunnya yang di berikan kepada Pemerintah Kota Tarakan dan juga masyarakat. PT. Mustika Aurora telah melakukan penanaman sebanyak 200 ribu bibit pohon mangrove sejak tahun 2006 hingga saat ini. Kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh kedua badan usaha sebagai bentuk komitmen dari perusahaan terhadap pelestarian lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Upaya pengawasan habitat di Kawasan KKMB juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, dan Dinas Kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup merupakan instansi pemerintahan yang berkaitan dengan masalah lingkungan. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup dalam kerjasama berfokus pada aspek pengawasan lingkungan yang ada di kawasan KKMB. Dinas Kehutanan merupakan instansi yang terlibat dan berfokus pada pengawasan hutan lindung khususnya kawasan KKMB. kerjasama yang melibatkan Dinas Peternakan berfokus pada pengawasan

terhadap keberadaan fauna yang terdapat di kawasan KKMB khususnya kesehatan monyet Bekantan.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pengembangan kawasan KKMB dilakukan dengan kerjasama dan juga koordinasi dengan berbagai stakeholder. Kerjasama yang dijalin berdasarkan atas kesepakatan bersama dan juga tanggung jawab perusahaan terhadap peletarian lingkungan.

e. Koordinasi

Koordinasi merupakan bentuk komunikasi yang bertujuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pelaksanaan pengembangan kawasan KKMB yang melibatkan berbagai stakeholder didalamnya tentu memerlukan koordinasi yang baik sehingga keberhasilan dapat tercapai dengan baik. Terkait dengan koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam pengembangan kawasan KKMB, Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Mengenai koordinasinya, jadi koordinasi kami dengan swasta itu hanya dilakukan ketika mereka ingin melakukan kegiatan di Kawasan KKMB. Sedangkan koordinasi yang kami lakukan dengan dinas-dinas terkait itu kami lakukan melalui rapat koordinasi. Jadi dalam pengelolaan Kawasan KKMB itu kita berkoordinasi dengan berbagai dinas-dinas yang terkait. Seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan.(wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dalam kerjasama yang dilakukan terdapat koordinasi antar instansi yang

terkait. Koordinasi itu dilakukan melalui rapat koordinasi. Rapat koordinasi tersebut terdiri dari Dinas Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan, dan Dinas Pariwisata. Sedangkan koordinasi yang dilakukan dengan badan usaha hanya sebatas komunikasi biasa seperti pemberitahuan. Dalam pengembangan Kawasan KKMB juga tidak terdapat tim yang memiliki fokus untuk pengembangan kawasan seperti halnya di daerah lain. Kepala Bagian Pengembangan Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Memang sampai saat ini kita belum ada membentuk tim kerja yang berfokus dalam pengembangan kawasan. Karena memang pengembangan yang kita lakukan saat ini tidak memiliki anggaran yang besar. Bahkan pengembangan saat ini lebih berharap mendapat dukungan dari pihak swasta untuk membantu anggaran.”(wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Daerah Kota Tarakan dengan PT. Pertamina dilakukan melalui koordinasi biasa. Koordinasi tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Pariwisata dengan tim CSR dari PT. Pertamina. Dalam kerjasama yang dijalin, Pemerintah Kota Tarakan tidak membentuk kelompok kerja seperti halnya yang dilakukan didalam pengembangan sebuah kawasan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, peneliti melihat proses pengembangan kawasan tanpa adanya pembentukan sebuah tim dirasa cukup memperlambat proses pengembangan kawasan. Pada kenyataannya dengan adanya tim kerja atau kelompok kerja, proses pengembangan kawasan dapat berjalan cepat sehingga dapat memberikan hasil yang maksimal.

Koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan PT. Mustika Aurora dilakukan atas dasar MoU. Namun, kesepakatan tersebut tidak membentuk sebuah tim ataupun koordinasi yang terstruktur. Perjanjian yang dibuat hanya sebatas perjanjian kesepakatan yang didalamnya hanya menyepakati pengembangan kawasan dibidang konservasi mangrove. Oleh karena itu, dalam kerjasama pengembangan kawasan KKMB yang dilakukan tanpa adanya koordinasi yang terstruktur. Tetapi, proses pengembangan Kawasan KKMB tetap berjalan dengan baik meskipun tanpa dibentuk sebuah tim kerja. Komitmen bersama yang kuat dari seluruh stakeholder dirasa telah mampu menjalankan pengembangan tanpa dibentuknya sebuah tim. Sehingga koordinasi yang dilakukan tidak menemui banyak kendala. Oleh karena itu, diharapkan koordinasi yang baik serta komunikasi yang baik antar *stakeholder* dapat terus berjalan dengan baik sehingga pengembangan kawasan KKMB dapat terus berjalan.

2.Dampak Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan

a. Dampak Ekonomi

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan beberapa *stakeholder* lainnya tentu memberikan dampak baik maupun buruk. Dampak pertama yang dirasakan yaitu dampak ekonomi. Pengembangan kawasan KKMB saat ini dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat terlihat dari perkembangan kawasan KKMB yang semula hanya sebagai kawasan konservasi kini menjadi kawasan ekowisata. Pengembangan kawasan KKMB saat ini telah berhasil

membawa kawasan KKMB menjadi salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kota Tarakan.

Pemerintah Kota Tarakan saat ini terus melakukan promosi kepariwisataan daerah yang salah satunya yaitu mempromosikan kawasan KKMB. Hal tersebut merupakan upaya untuk menarik jumlah kunjungan wisatawan. Setiap hari libur misalnya, banyak masyarakat yang berkunjung ke kawasan KKMB. Seperti libur lebaran yang selalu ramai dikunjungi wisatawan. Seperti yang dikatakan Pak Iwan selaku petugas lapangan yang mengatakan:

“Kalo hari minggu disini rame mas. Mulai siang gitu udah rame. Kan disini nda panas mas malah sejuk banyak pohon-pohon kan. Apalagi kalo libur lebaran itu bisa rame banget pengunjungnya. Kebanyakan dari pengunjung itu pengen lihat bekantan itu mas.”(wawancara pada tanggal 5 Agustus 2017 di kawasan KKMB)

Kepala seksi pengembangan ODTW Dinas Pariwisata Kota Tarakan menambahkan:

“Di Tarakan ini kan wisatanya gak terlalu banyak. Kita juga sedang berupaya untuk membuat obyek-obyek wisata baru yang bisa dinikmati masyarakat nantinya. Kita bisa lihat di Tarakan ini kan kalo mau wisata kalo nda ke pantai yang ke mangrove itu. Jadi ya kalo masyarakat ingin yang sejuk-sejuk datanglah mereka ke KKMB. makanya kita terus berupaya mengembangkan kawasan KKMB untuk tetap nyaman dikunjungi. (wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Dengan adanya kawasan KKMB sebagai destinasi wisata di Kota Tarakan diharapkan juga dapat menumbuhkan aktor-aktor kepariwisataan yang juga nantinya berpengaruh terhadap perekonomian Kota Tarakan. Sehingga nantinya akan memberikan dampak yang lebih besar bagi

pendapatan asli daerah. Kepala Seksi Pengembangan ODTW Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Untuk pendapatan sih saat ini belum begitu mempengaruhi ya. Karena memang yang kami dapat saat ini hanya sekitar 85 juta dalam setahun. Hal itu masih sangat sedikit menurut kami. Makanya kami terus membangun atraksi-atraksi baru di KKMB itu untuk menarik lebih banyak lagi jumlah kunjungan wisatawan. Ya semoga kedepannya keberadaan KKMB ini dapat membantu peningkatan PAD Tarakan lah.(wawancara pada tanggal 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Pengembangan kawasan KKMB dirasa belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapat asli daerah (PAD). Dari hasil wawancara diatas, diketahui bahwa pendapatan Dinas Pariwisata dari pengelolaan kawasan KKMB hanya sebesar 85 juta rupiah saja selama setahun. Tetu hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan anggaran yang besar untuk pengelolaan kawasan KKMB dalam setahun. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata masih perlu membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak agar pembangunan di kawasan KKMB terus berjalan. Selain itu, Dengan adanya keterlibatan berbagai stakeholder yang ada membuat hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kota Tarakan dapat sedikit teratasi. Masalah anggaran terbatas yang dialami pemerintah dapat teratasi berkat adanya bantuan dari berbagai pihak. Sehingga pengembangan kawasan KKMB tetap berjalan dengan baik. Kerjasama yang dijalin telah memberikan dampak yang baik bagi perkembangan kawasan KKMB .

Pengembangan kawasan KKMB saat ini dirasa perlu untuk melibatkan sektor UMKM didalam penyelenggaraan kepariwisataan

dikawasan KKMB agar pendapat pengelolaan KKMB bisa meningkat. Terkait hal tersebut, kepala bagian pengembangan destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Sampai saat ini memang belum melibatkan UMKM di KKMB ini karena memang masih dalam proses perencanaan. Karena perlu adanya perencanaan yang matang untuk melibatkan sektor UMKM seperti pelatihan dan penyediaan lahan untuk mereka. Mungkin nanti yang menjadi prioritas kami ya itu melibatkan sektor UMKM di dalamnya nanti.”(wawancara di Dinas Pariwisata Kota Tarakan)

Dengan adanya keterlibatan berbagai badan usaha maupun dinas yang terkait dalam mengembangkan kawasan, diharapkan kedepannya dapat terus meningkatkan kualitas lingkungan dan juga kualitas kepariwisataan khususnya di kawasan KKMB. Sehingga nantinya akan berpengaruh lebih besar kepada sektor perekonomian.

b. Dampak Sosial

Dalam kerjasama pengembangan kawasan KKMB, pengembangan kawasan KKMB melalui pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan tentunya memberikan dampak sosial terhadap masyarakat sekitar. Dampak sosial pertama yang dirasakan yaitu adanya lapangan pekerjaan baru. Terkait dengan pengelolaan kawasan, Pemerintah Kota Tarakan telah mempekerjakan belasan pekerja yang setiap harinya bertugas mengelola kawasan KKMB. Terdapat 16 pekerja lapangan yang saat ini mengurus pengelolaan kawasan. Pekerja tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang diantaranya petugas kebersihan, penjaga loket, penjaga ruang informasi, dan juga keamanan.

Dampak sosial kedua yaitu dampak bagi pendidikan. Pengembangan Kawasan KKMB telah membawa kawasan tersebut menjadi kawasan ekowisata. Tentunya, banyak hal yang dapat dilakukan di kawasan tersebut. masyarakat dapat melakukan kegiatan kepariwisataan, belajar, penelitian, maupun olahraga. kawasan tersebut dapat dijadikan sebagai tempat belajar mengenai ekosistem pesisir.

Dampak kerjasama juga telah memberikan pengaruh yang besar terhadap peran dari masing-masing stakeholder. Terlihat dari ikut berkontribusinya beberapa badan usaha dalam pelestarian lingkungan juga keterlibatan masyarakat juga menjadi pengaruh bagi keberhasilan pengembangan kawasan. Kerjasama tersebut telah berhasil menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberadaan ekosistem pesisir khususnya kawasan mangrove. Dalam kerjasama yang dilakukan telah membuat komunikasi antar sektor menjadi semakin baik. Sehingga tidak terdapat pergesekan antar sektor. Tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil pengembangan.

Terkait dengan penjelasan dampak sosial pengembangan kawasan KMBB diatas, Kepala seksi pengembangan ODTW Dinas Pariwisata Kota Tarakan menjelaskan:

“Mengenai dampak sosialnya, mungkin yang bisa saya lihat di KKMB saat ini itu masyarakat bisa berwisata dan juga belajar tentang mangrove disana. Bahkan ada banyak peneliti juga yang datang untuk meneliti kawasan KKMB itu. Selain itu, banyak juga warga atau masyarakat yang aktif ikut kegiatan penanaman pohon mangrove. Banyak dari mereka datang dari sekolah, instansi, dan

juga masyarakat. Kan ini merupakan kegiatan positif yang memang harus dilakukan untuk penyelamatan lingkungan. ya untungnya masyarakat punya kesadaran yang tinggi akan keberadaan KKMB ini jadi diharapkan KKMB ini dapat berkembang dengan cepat atas dukungan semua pihak.”(wawancara pada tanggal 14 agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Kepedulian terhadap lingkungan melalui program pelestarian lingkungan juga telah membawa PT. Pertamina EP Tarakan menerima penghargaan dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia pada tahun 2015. Ini merupakan hasil dari kontribusi perusahaan terhadap pengembangan Kawasan KKMB yang dirasa telah berhasil membangun kawasan mejadi lebih baik.

c. Dampak Lingkungan

Kerjasama pengembangan Kawasan KKMB tentu memberikan dampak dan pengaruh yang besar bagi lingkungan disekitarnya. Komitmen bersama merupakan kunci keberhasilan dalam mengembangkan kawasan. Terkait dengan dampak lingkungan, Kepala seksi pengembangan ODTW Dinas Pariwisata Kota Tarakan mengatakan:

“Konservasi yang kita lakukan selama ini bisa dikatakan berhasil. Ya kita bisa lihat dari meningkatnya jumlah luas kawasan yang tadinya hanya 12 Ha saja dan sekarang sudah sekitar 22 Ha. Lalu, bekantannya juga saat ini semakin banyak dan lebih mudah untuk ditemui. Sekarang itu disana terdapat 2 kelompok bekantan yang hidup disana. Mungkin totalnya sekitar 36 ekor.”(wawancara pada tanggal 14 agustus 2017 di Dinas Pariwisata).

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Keadaan Kawasan KKMB saat ini dapat dikatakan dalam kondisi yang baik. Pengembangan yang dilakukan melalui kerjasama telah berhasil memperluas kawasan yang tadinya hanya sekitar 12 Ha dan kini telah

memiliki luas sekitar 22 Ha. Keberadaan hewan Bekantan juga semakin meningkat berkat koordinasi yang baik dengan dinas yang terkait. Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan saat ini tidak hanya sebagai kawasan konservasi saja. Tetapi juga digunakan sebagai aktivitas pariwisata atau tepatnya sebagai kawasan ekowisata. Berikut ini merupakan gambaran perkembangan perluasan kawasan KKMB:



Gambar 13. Perkembangan luas kawasan KKMB

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Tarakan, 2017

Terkait dengan pembangunan yang dilakukan, Kepala bagian pengembangan destinasi wisata, Kepala seksi pengembangan ODTW Dinas Pariwisata Kota Tarakan menjelaskan:

“Kan Kawasan KKMB ini merupakan kawasan konservasi dimana yang ada didalamnya itu semuanya harus dijaga dan dikelola dengan baik. Tentunya dengan kita bekoordinasi dengan

Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat terus mengontrol keberlangsung hidup seluruh penghuni yang ada di Kawasan KKMB. pembangunan yang kita lakukan di KKMB tentunya selalu memperhatikan dampak yang ditimbulkan. Contohnya aja seluruh jembatan yang dibangun itu tidak memotong pohon mangrove yang ada. Makanya jalannya gak lurus dan berbelok-belok gitu. Untuk masalah wisatanya, kita juga sudah sediakan tempat sampah di sepanjang jalannya itu. Agar pengunjung yang membawa makanan atau minuman bisa membuang limbahnya ke dalam tempat sampah itu. Ya untung saja banyak pengunjung yang sadar akan keberadaan tempat sampah walaupun kita masih nemuin pengunjung yang belum sadar akan kebersihan. Namun tidak semua sampah yang ditemukan di Kawasan KKMB itu hasil dari limbah pengunjung tapi ya kebanyakan datang dari bawaan air pasang begitu.”(wawancara 14 Agustus 2017 di Dinas Pariwisata)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, pembangunan infrastruktur yang dibangun di Kawasan KKMB tetap memperhatikan aspek lingkungan. Terkait dengan kebersihan, Pemerintah Kota Tarakan telah mengantisipasi dengan menyediakan tempat sampah berupa tong sampah di sepanjang jalan yang ada di Kawasan KKMB. Dengan adanya ketersediaan tempat sampah di Kawasan KKMB tentu diharapkan kesadaran pengunjung untuk membuang sampah ketempatnya menjadi lebih baik.

Pembangunan kawasan yang baik dengan memperhatikan aspek lingkungan tentunya mempengaruhi ekosistem yang ada di Kawasan KKMB. Meningkatnya populasi mangrove yang ada di Kawasan KKMB juga diikuti dengan meningkatnya pertumbuhan biota pesisir. Kawasan KKMB yang telah berkembang dengan baik kini telah dijadikan sebagai labolatorium hidup. Beberapa peneliti dari berbagai negara pernah berkunjung ke Kawasan KKMB untuk meneliti habitat dari ekosistem

pesisir. Oleh karena itu, pembangunan di Kawasan KKMB telah memberikan dampak yang baik bagi lingkungan.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Kerjasama antar stakeholder dalam mengembangkan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan, Meliputi :

a. Stakeholder yang terlibat

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan penentu bagi keberhasilan pembangunan yang ada di daerah. Pengelolaan pemerintahan yang baik biasa juga disebut dengan konsep *Good Governance*. Pada dasarnya, penyelenggaraan *Good Governance* merupakan pelaksanaan dari peran pemerintah yang melibatkan berbagai stakeholder didalamnya. Menurut Sj Sumarto (2009:1), bahwa *governance* merupakan peran pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk melakukan upaya tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa peran pemerintah yang tadinya sebagai pelaksana pembangunan telah bergeser menjadi pendorong bagi sektor lain untuk terlibat dalam pembangunan. Karena pada dasarnya, dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya peran dari sektor swasta dan juga masyarakat. Seperti yang dikatakan Syafri (2012:177) bahwa institusi dari *governance* itu meliputi tiga domain yaitu *State* (negara atau pemerintah), *Private Sector* (sektor swasta atau dunia

usaha), dan *Society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sedangkan sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan, dan masyarakat berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Dalam kaitannya dengan pengembangan Kawasan KKMB, Pemerintah Daerah Kota Tarakan sebagai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan juga selaku pengelola kawasan telah melibatkan berbagai aktor didalam melaksanakan pengembangan kawasan. Aktor yang terlibat diantaranya: *Pertama*, dalam pengembangan Kawasan KKMB, Pemerintah Kota Tarakan khususnya Dinas Pariwisata selaku pengelola utama kawasan melakukan kerjasama dengan berbagai dinas terkait yang diantaranya Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Kesehatan. Kerjasama yang dibuat bertujuan untuk mengelola kawasan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Keberadaan Kawasan KKMB tidak hanya sebagai kawasan konservasi semata melainkan juga sebagai kawasan ekowisata yang perlu dikelola dengan baik dan dikembangkan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kerjasama dengan dinas-dinas terkait dianggap sangat perlu untuk dilakukan. Keterlibatan berbagai dinas-dinas terkait dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan juga menjadikan hubungan antar

instansi semakin baik. Sehingga keinginan dan target dari Pemerintah Kota Tarakan dalam mengembangkan kawasan dapat tercapai dengan baik.

Kedua, pelaku usaha yang terdiri dari PT. Pertamina dan PT. Mustika Aurora. Pelaku usaha merupakan berbagai aktor yang berasal dari badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta yang berada di Kota Tarakan. Aktor yang ketiga yaitu masyarakat. Peran badan usaha dalam penyelenggaraan pembangunan sangat penting karena memiliki peran sebagai sumber penerimaan. Sedangkan masyarakat sebagai kelompok yang dapat mempengaruhi kebijakan dan juga hasil pembangunan. Dengan adanya keterlibatan dari badan usaha maupun masyarakat bahwasannya Pemerintah Kota Tarakan telah memberikan jalan bagi kedua sektor tersebut untuk berpartisipasi terhadap pembangunan. Pemerintah Kota Tarakan juga telah mendorong badan usaha untuk berkontribusi bagi pembangunan khususnya pembangunan lingkungan.

Kontribusi badan usaha dalam pengembangan kawasan melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan khususnya pelestarian lingkungan. Dalam hal ini, terdapat 3 dimensi menurut Elkington (1997) yang mencakup tanggung jawab sosial perusahaan diantaranya:

1. Mencapai keuntungan (*profit*) bagi perusahaan. Fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan.
2. Memberdayakan masyarakat (*people*) perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusia, yaitu para pemangku

kepentingan baik kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder.

3. Memelihara kelestarian alam/bumi (*planet*).

Terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, hal tersebut telah tertuang didalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa setiap perusahaan bertanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Meskipun kegiatan CSR merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek sosial dan lingkungan. Namun, masih terdapat pro dan kontra di dalam pelaksanaannya. Sasaran pelaksanaan CSR yang banyak dianggap tidak tepat sasaran menjadi masalah hingga saat ini. Hal ini merupakan tidak adanya kejelasan didalam peraturan perundang-undangan yang hanya menyebutkan tentang kewajiban perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial tetapi tidak dilengkapi dengan sasaran pelaksanaan CSR. Hingga saat ini belum ada peraturan sendiri mengenai pelaksanaan CSR lebih konkrit. Sehingga pelaksanaan CSR tersebut masih terdapat pro dan kontra di dalam pelaksanaannya.

Menurut peneliti, Berdasarkan Undang-undang tersebut, badan usaha yang terlibat dalam pengembangan kawasan KKMB telah menjalankan kewajibannya dengan baik. Kewajiban perusahaan telah dijalankan melalui kontribusi perusahaan kepada

pemerintah melalui kerjasama pengembangan kawasan. Pemerintah Daerah telah memberikan ruang terhadap badan usaha untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah tidak hanya terhadap pembangunan perekonomiannya saja tetapi juga pembangunan lingkungan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan dan juga perusahaan telah berjalan sesuai dengan kewajibannya masing-masing.

Ketiga. Dalam pengembangan kawasan, Pemerintah tidak hanya melibatkan sektor swasta tetapi juga melibatkan semua sektor termasuk masyarakat. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 unsur yang mempengaruhi jalannya pemerintahan diantaranya, Pemerintah, Swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat menjadi sangat penting karena nantinya akan berpengaruh terhadap hasil yang dikerjakan. Dalam pengembangan Kawasan KKMB ini, masyarakat adalah warga Kota Tarakan yang tinggal di sekitar Kawasan KKMB. Masyarakat akan memberikan pengaruh yang besar terhadap keberadaan kawasan mangrove. Masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penyebab rusaknya kawasan mangrove akibat kegiatan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan. seperti yang dikatakan Dahuri (2003:207) yang menyebutkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab rusaknya hutan mangrove, yaitu:

- a) Konservasi kawasan hutan mangrove yang secara tak terkendali menjadi tambak, pemukiman dan kawasan industri.
- b) Terjadi tumpang tindih pemanfaatan kawasan hutan mangrove untuk berbagai kegiatan pembangunan.

- c) Penebangan mangrove untuk kayu bakar, bahan bangunan dan kegunaan lainnya melebihi kemampuan untuk pulih (*renewable capacity*)
- d) Pencemaran akibat buangan limbah minyak, industri, dan rumah tangga.
- e) Pengendalian akibat pengelolaan kegiatan lahan atas yang kurang baik.
- f) Proyek pengairan yang dapat mengurangi aliran masuk air tawar (unsur hara) ke dalam ekosistem hutan mangrove.
- g) Proyek-proyek pembangunan yang dapat menghalangi atau mengurangi sirkulasi arus pasang surut.

Oleh karena itu, dengan adanya keterlibatan masyarakat didalam pengembangan kawasan dapat membuat proses pembangunan dan pengembangan kawasan dapat terus berjalan dengan baik. Jadi, pelaksanaan pemerintahan yang baik yang diterapkan didalam pengembangan Kawasan KKMB telah berjalan sesuai dengan semestinya.

b. Peran Stakeholder

Dalam pengembangan Kawasan KKMB, terdapat beberapa *stakeholder* yang memiliki peranan penting didalamnya. Pertama, Pemerintah dalam hal ini merupakan sebagai aktor kunci yang menentukan arah kebijakan sehingga dapat menciptakan sebuah aturan yang harus dilakukan oleh setiap badan usaha. Aturan tersebut merupakan dasar terhadap kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah khususnya pembangunan lingkungan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Tarakan telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya masing-masing. Seperti yang dikatakan Hetifah, (2009:1-2) menyebutkan bahwa dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor paling penting menentukan. Implikasinya, peran

pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwasannya Pemerintah Kota Tarakan telah memfasilitasi bagi seluruh sektor diantaranya sektor swasta dan juga masyarakat untuk berpartisipasi terhadap pembangunan daerah khususnya pembangunan kawasan. *Kedua*, keterlibatan sektor swasta didalam pengembangan Kawasan KKMB merupakan kewajiban dari sebuah badan usaha yang diharuskan untuk memberikan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaannya terhadap pembangunan daerah. Dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Maka dari itu, keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan kawasan merupakan kewajiban dari sebuah perusahaan untuk terlibat didalam pelestarian lingkungan. Dengan adanya keterlibatan berbagai sektor telah mampu mempercepat pembangunan khususnya pembangunan di Kawasan KKMB tersebut.

c. Bentuk Kerjasama

Bentuk kerjasama dalam pengembangan kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan dapat terlihat dari pelaksanaannya. Menurut Rosen dalam Keban (2007:33), bentuk perjanjian kerjasama dibedakan atas:

1. *Handshake agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang tidak didasarkan atas perjanjian tertulis.
2. *Written agreements*, yaitu pengaturan kerjasama yang didasarkan atas perjanjian tertulis.

Jika melihat dari data yang telah disajikan sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) bentuk kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan dengan *stakeholder* yang lain. Pertama, kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan PT. Pertamina merupakan bentuk dari pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Oleh karena itu, kerjasama tersebut termasuk kedalam bentuk *Handshake agreements*. Dalam kerjasama tersebut tidak ditemukan perjanjian tertulis didalam. Kerjasama tersebut dilakukan atas dasar kepedulian perusahaan terhadap pelestarian lingkungan. sehingga yang dilakukan dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua, kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan dengan PT. Mustika Aurora termasuk kedalam bentuk kerjasama *Written agreements*. Dalam pelaksanaannya terdapat perjanjian tertulis yang dibuat bersama-sama.

Selain itu, terdapat juga pengaturan kerjasama menurut Roben dalam Keban (2007:33) yang terdiri dari beberapa bentuk, diantaranya:

1. *Consortia*, yaitu pengaturan kerjasama alam sharing sumberdaya, karena lebih mahal jika ditanggung sendiri-sendiri.
2. *Joint purchasing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam melakukan pembelian barang agar dapat menekan biaya karena skala pembelian lebih besar.
3. *Equipment sharing*, yaitu pengaturan kerjasama dalam sharing peralatan yang mahal, atau yang tidak setiap hari digunakan.
4. *Cooperative construction*, yaitu pengaturan kerjasama yang dalam mendirikan bangunan.
5. *Contract services*, yaitu pengaturan kerjasama dimana pihak yang satu mengontrak pihak lain untuk memberikan pelayanan tertentu.
6. Pengaturan lainnya, pengaturan kerjasama lain dapat dilakukan selama dapat menekannkan biaya, misalnya membuat pusat pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Tarakan dapat dilihat bentuk pengaturan melalui hasil pelaksanaan. Hasil tersebut termasuk kedalam bentuk *cooporative contruction*. Hal tersebut terwujud dari hasil pelaksanaan pembangunan berbagai infrastruktur yang saat ini bisa dilihat dan dirasakan langsung oleh pengunjung ketika berada di Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan Kota Tarakan.

d. Program kerjasama

Dalam pelaksanaan kerjasama tentu terdapat tujuan yang ingin dicapai melalui sebuah program. Menurut Abdulsyani (1994:156), kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan

saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Berdasarkan hal tersebut, aktivitas yang dilakukan oleh antar stakeholder dalam kerjasama pengembangan Kawasan KKMB adalah membangun berbagai sarana dan prasarana di kawasan KKMB.

Pengembangan Kawasan KKMB melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder sejatinya telah berhasil melaksanakan berbagai program pembangunan. Hal tersebut dapat dilihat langsung di Kawasan KKMB yang juga telah disajikan didalam bagian penyajian data pada bab ini. Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan KKMB, tentunya terdapat berbagai program yang dirancang untuk dikerjakan nantinya. Dalam hal ini, pelaksanaan pengembangan Kawasan KKMB telah memiliki berbagai program pengembangan diantara pembangunan berbagai infrastruktur baru serta perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang mulai rusak.

Program-program kerjasama yang dilakukan oleh pengelola bersama dengan *stakeholder* lainnya dirasa telah melaksanakan program secara maksimal. Hal tersebut terbukti dengan pengerjaan pembangunan yang dilakukan secara tepat waktu serta infrastruktur yang dibangun sudah dapat dinikmati oleh pengunjung meskipun terdapat beberapa infrastruktur yang masih dalam tahap pembangunan. Dengan adanya berbagai program kerjasama saat ini, diharapkan dapat menambah program kerja lagi sehingga Kawasan KKMB dapat terus meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan nantinya.

e. Koordinasi

Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan KKMB terdapat beberapa koordinasi yang dilakukan antara pemerintah dengan berbagai stakeholder. Menurut Ndraha (2003:290), Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Oleh karena itu, koordinasi yang dilakukan antar stakeholder dalam kerjasama pengembangan kawasan KKMB dirasa sah-sah saja untuk dilakukan. Karena Ndraha (2003:290) juga mengartikan bahwa koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu. Dengan adanya komunikasi antar stakeholder dapat dikatakan bahwa koordinasi tersebut sudah berjalan dengan baik.

Koordinasi yang baik juga dapat dilihat melalui beberapa indikator. Seperti indikator koordinasi menurut Handyaningrat (1989:80) yang dapat diukur melalui :

2. Komunikasi
 - a. Ada tidaknya informasi
 - b. Ada tidaya alur informasi
 - c. Ada tidaknya teknologi informasi
3. Kesadaran pentingnya koordinasi
 - a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap koordinasi
 - b. Tingkat ketatan terhadap hasil koordinasi
4. Kompetensi partisipan

- a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
- b. Ada tidaknya ahli dibidang pembangunan yang terlibat
- 5. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi
 - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
 - b. Ada tidaknya pelaksana kegiatan
 - c. Ada tidaknya saksibagi pelanggar kesepakatan
 - d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi
- 6. Kontinuitas perencanaan
 - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Point pertama dalam indikator di atas menyebutkan adanya komunikasi. Hal tersebut juga telah dilakukan oleh seluruh stakeholder dalam melaksanakan kerjasamanya. Dengan adanya komunikasi yang baik dapat menghasilkan tercapainya tujuan yang diinginkan. Sehingga program yang dilakukan secara bersama-sama dapat selesai terlaksana.

Terkait koordinasi antara Dinas Pariwisata dengan dinas-dinas terkait, Menurut Inu Kencana (2011:35), terdapat beberapa bentuk Koordinasi diantaranya :

- a) Koordinasi Horizontal
Koordinasi Horizontal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang sederajat misalnya antar Muspika Kecamatan (Camat, Kapolsek, Danramil), antar Muspida Kabupaten (Bupati, Danramil, Kapolres), dan Muspida Provinsi (Gubernur, Pangdam, Kapolda).
- b) Koordinasi Vertikal
Koordinasi Vertikal adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron dari lembaga yang sederajat lebih tinggi kepada lembaga lembaga lain yang derajatnya lebih rendah. Misalnya antar Kepala Unit suatu Instansi kepada Kepala Sub Unit lain diluar mereka, Kepala Bagian (Kabag), suatu Instansi kepada Kepala Sub Bagian (Kasubag) lain diluar bagian mereka, Kepala Biro suatu Instansi kepada Kepala Sub Biro lain diluar biro mereka.

c) Koordinasi Fungsional

Koordinasi Fungsional adalah penyelarasan kerjasama secara harmonis dan sinkron antar lembaga lembaga yang memiliki kesamaan dalam fungsi pekerjaan misalnya antar sesama para kepala bagian hubungan.

Berdasarkan penjelasan di atas, jika di lihat dari pelaksanaan

koordinasi di lapangan maka dapat dikategorikan kedalam bentuk koordinasi fungsional. Koordinasi yang dilakukan antara lain koordinasi diantara Dinas Pariwisata dengan Dinas Lingkungan Hidup. Hal terpenting didalam sebuah kerjasama tentu perlu adanya koordinasi yang baik. Selain itu, pentingnya koordinasi didalam kerjasama adalah adanya komunikasi yang baik antar pihak.

2. Dampak Pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan, Meliputi :

a. Dampak Ekonomi

Kawasan mangrove merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting bagi lingkungan. Kawasan mangrove tidak hanya berperan sebagai penyangga didaerah pesisir dan rumah bagi fauna mangrove saja. Tetapi, kawasan mangrove juga memiliki peran sosial dan ekonomi yang penting yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Terkait hal tersebut, Saparinto (2007:26) menjelaskan bahwa ada beberapa fungsi dan manfaat baik yang langsung maupun tidak langsung yang dapat dirasakan oleh manusia dan lingkungannya. Fungsi tersebut diantaranya fungsi fisik, kimia, biologi, dan sosial ekonomi.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasannya pengelolaan kawasan mangrove dapat memberikan dampak yang baik bagi

perekonomian. Tetapi, dalam pelaksanaan kerjasama ini belum memberikan hasil yang signifikan bahkan pengaruh yang besar terhadap aspek ekonomi. Berdasarkan data yang telah disajikan sebelumnya menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Tarakan dengan beberapa *stakeholder* belum memberikan pengaruh yang besar terhadap pendapatan daerah khususnya pendapatan dari sektor pariwisata di Kawasan KKMB. Tetapi, kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan hanya berfokus pada pelestarian lingkungan di Kawasan KKMB bukan berfokus pada kegiatan kepariwisataan. Hal ini yang membuat kerjasama tersebut tidak memberikan dampak yang besar bagi aspek ekonomi. Selain itu, belum dilibatkannya peran UMKM dirasa merupakan salah satu faktor dari tidak memberikan dampak yang begitu besar bagi perekonomian. Jika sebuah kawasan yang melakukan kegiatan kepariwisataan seharusnya langsung melibatkan sektor UMKM di dalamnya agar dapat mendukung kegiatan kepariwisataan dan juga dapat mempengaruhi jumlah pendapatan daerah itu sendiri..

Adanya kerjasama antara Pemerintah Kota Tarakan dengan beberapa *stakeholder* telah membantu pemerintah selaku pengelola kawasan dalam hal ketersediaan anggaran. Pemanfaatan bantuan dana CSR dengan melibatkan beberapa badan usaha dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan Kota Tarakan tentunya memberikan pengaruh yang baik bagi jalannya pemerintahan. Dalam wujud pelaksanaan *good governance* menurut Sedarmayanti (2003:4-5)

adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif diantara domai-domain negara, swasta, dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwa pemanfaatan bantuan dana CSR dari berbagai badan usaha membuat pemerintah daerah menjadi efisien dalam pengeluaran anggaran. Meskipun memberikan dampak yang baik bagi pemerintah. Keberhasilan dari program kerjasama tersebut belum memberikan dampak yang besar bagi perekonomian Kota Tarakan.

b. Dampak Sosial

Dalam pengembangan Kawasan KKMB melalui kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan bersama dengan badan usaha telah memberikan dampak sosial yang baik diantara keduanya. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa dengan adanya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha telah membuat hubungan yang baik diantara sektor Pemerintahan dengan sektor swasta. Selain itu, dengan adanya kerjasama tersebut telah memberikan tempat bagi sektor swasta untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai perusahaan. Keberadaan kerjasama diantara Pemerintah Kota Tarakan dengan sektor swasta telah memberikan pengaruh yang besar terhadap perusahaan yang lain. Dengan adanya kerjasama yang sudah terjalin membuat perusahaan-perusahaan yang lain menginginkan untuk dapat bergabung bersama dalam pengembangan Kawasan KKMB. Oleh karena itu, kerjasama yang

dijalankan telah memberikan pengaruh dan juga dampak positif bagi Pemerintah Kota Tarakan.

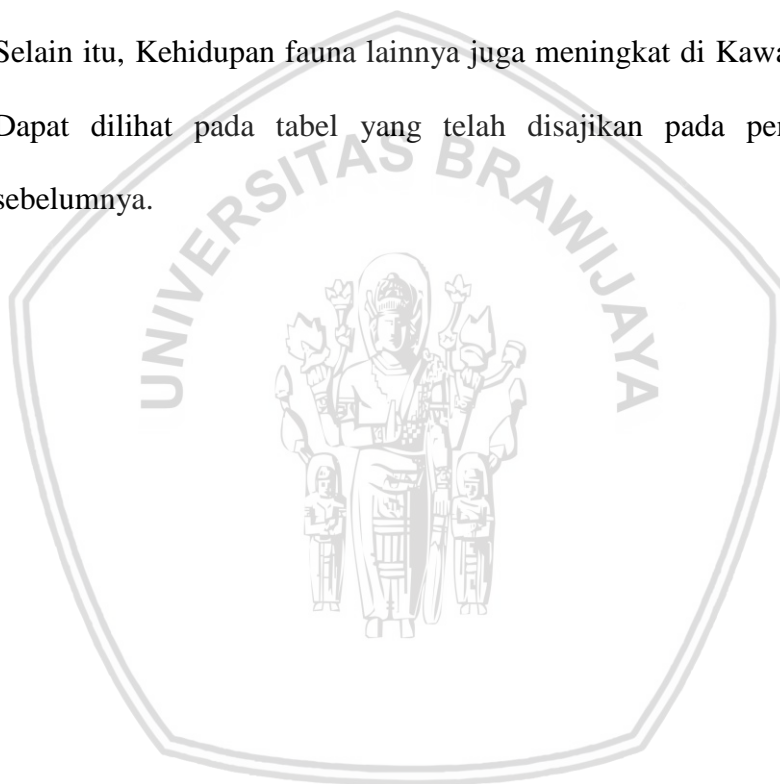
Pengembangan Kawasan KKMB juga telah mengarahkan kawasan tersebut menjadi kawasan wisata yang beredukasi. Sehingga kegiatan yang dilakukan di Kawasan KKMB tidak hanya semata menikmati keindahannya sa melainkan juga dapat belajar mengenal biota kawasan pesisir tersebut. pengembangan Kawasan KKMB telah meberikan dapaka terhadap pendidikan. Terlihat dari data yang disajikan bahwa keberadaan Kawasan KKMB dapat dijadikan tempat belajar dari berbagi komponen masyarakat.

Kerjasama yang dilakukan juga telah membuat hubungan antar instansi pemerintahan semakin baik. Sehingga diharapkan kinerja dinas-dinas terkait semakin baik dan semakin termotivasi untuk mempercepat pembangunan di Kota Tarakan khususnya pembangunan dikawasan KKMB.

c. Dampak Lingkungan

Pengembangan Kawasan KKMB telah memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan ekosistem disekitarnya. Pengembangan yang dilakukan selama ini telah berhasil meningkatkan jumlah populasi mangrove yang ada di Kota Tarakan. Dapat dilihat dari meningkatnya luas kawasan yang ada sekarang. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa keadaan lingkungan di Kawasan KKMB semakin membaik.

Pengembangan kawasan juga berdampak pada kehidupan berbagai jenis hewan yang ada di Kawasan KKMB. Keberhasilan pengembangan Kawasan KKMB telah meningkatkan jumlah populasi kewanan Bekantan hingga saat ini. Hal tersebut tentunya akan memberikan dampak bagi pengunjung sehingga pengunjung Kawasan KKMB menjadi lebih mudah untuk bertemu dan melihat kewanan monyet hidung panjang tersebut. Selain itu, Kehidupan fauna lainnya juga meningkat di Kawasan KKMB. Dapat dilihat pada tabel yang telah disajikan pada penyajian data sebelumnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan selama dilapangan dengan mengumpulkan berbagai data yang berhubungan dengan fokus penelitian baik melalui wawancara, dokumentasi maupun observasi serta sesuai data yang telah disajikan dan dibahas oleh peneliti mengenai kerjasama pengembangan Kawasan KKMB di Kota Tarakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama antar *stakeholder* dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan dapat diketahui sebagai berikut:
 - a. Pengembangan Kawasan KKMB telah melibatkan berbagai stakeholder, diantaranya adalah Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, PT. Pertamina EP Field Tarakan, PT. Mustika Aurora dan Masyarakat.
 - b. Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan KKMB, masing-masing *stakeholder* telah menjalankan perannya masing-masing dengan baik sehingga proses pembangunan di Kawasan KKMB dapat berjalan maksimal dan sesuai dengan tujuan.
 - c. Dalam pelaksanaan pengembangan Kawasan KKMB, kerjasama yang dilakukan melalui pelaksanaan bantuan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari masing-masing Perusahaan. Tetapi,

terdapat 2 bentuk kerjasama yang dilakukan antar *stakeholder* diantaranya adalah *handshake agreements* dan *written agreements*. Berdasarkan bentuknya, kerjasama melalui perjanjian tidak tertulis dilakukan antara Pemerintah Kota Tarakan dengan PT. Pertamina EP Field Tarakan. Sedangkan kerjasama yang dilakukan atas dasar perjanjian tertulis dilakukan antara Pemerintah dengan PT. Mustika Aurora.

- d. Dalam pelaksanaan kerjasama pengembangan KKMB, tidak terdapat koordinasi yang terstruktur. Artinya, dalam kerjasama yang dilakukan tidak membentuk sebuah tim kerja. Tetapi koordinasi yang dijalankan antara Pemerintah Kota Tarakan dengan sektor swasta hanya sebatas komunikasi biasa.

2. Dampak kerjasama antar stakeholder dalam pengembangan Kawasan Konservasi Mangrove dan Bekantan di Kota Tarakan, dapat diketahui bahwa kerjasama yang dilakukan diantara Pemerintah dengan para stakeholder lainnya telah memberikan berbagai dampak terhadap sektor diantaranya sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pertama, Hasil pengembangan Kawasan KKMB telah membawa kawasan tersebut sebagai salah satu destinasi pariwisata terbaik yang ada di Kota Tarakan. Meskipun begitu, pengaruh yang dihasilkan tidak begitu besar terhadap pendapatan asli daerah. pemanfaatan UMKM juga dirasa belum maksimal terlihat dari kondisi di lapangan yang belum tersedianya tempat-tempat penjualan makanan maupun

souvenir yang layak di kawasan tersebut. Kedua, dampak sosial yang dari pengembangan Kawasan KKMB adalah hubungan antar *stakeholder* semakin baik. Kerjasama yang dilakukan telah berhasil mengundang berbagai perusahaan baik perusahaan lokal maupun perusahaan asing. Tingkat kepedulian masyarakat terhadap keberadaan kawasan mangrove juga semakin tinggi. Ketiga, dampak lingkungan yang dirasakan adalah meningkatnya jumlah luas mangrove di kawasan KKMB.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan mampu membantu pengembangan Kawasan KKMB agar dapat memberikan hasil yang maksimal, diantaranya adalah:

- 1) Dalam pengembangan kawasan, perlu adanya pembentukan tim kerja atau tim gabungan untuk mempercepat proses pembanguana dan pengembangan. Sehingga hasil yang didapatkan maksimal.
- 2) Pemerintah Kota Tarakan perlu melibatkan sektor UMKM didalam pelaksanaan kepariwisataan di Kawasan KKMB. sehingga nantinya akan memberikan dampak perekonomian yang lebih besar dan juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan.
- 3) Pemerintah Kota Tarakan diharapkan bisa lebih aktif dalam mencari investor untuk pengembangan Kawasan KKMB. Agar pengembangan yang dilakukan mendapatkan lebih banyak bantuan modal untuk pengembangan kawasan.

- 4) Lebih aktif dalam melakukan promosi kepariwisataan khususnya kawasan ekowisata KKMB. Agar kunjungan wisatawan ke Kawasan KKMB dapat terus meningkat.



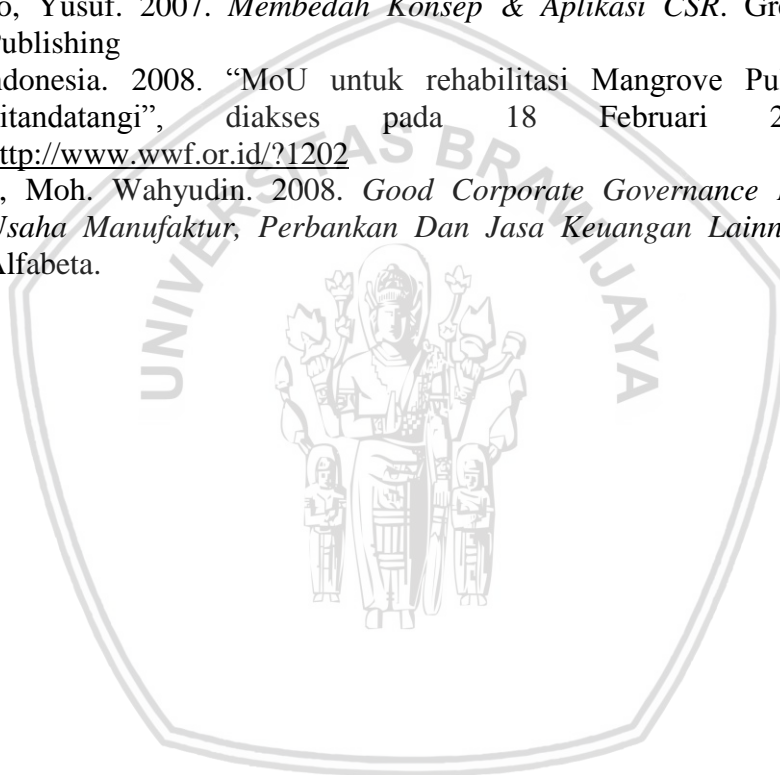
DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijakan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Anoraga, Panji. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsini. 2000. *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asdak, Chay. 2012. *Kajian Lingkungan Hidup Strategis: jalan menuju pembangunan berkelanjutan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Basuki, Anton dan Shofwan. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. 2006. Malang. SPOD-FEUB
- Bryson, John, M 2001. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*. Edisi Bahasa Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Bungin, Burhan.(2009). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana
- Dahuri, R. 2003. *Keanekaragaman Hayati Laut. Aset Pembangunan Berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Daniri, Mas Achmad. 2005. *Good Corporate Governance konsep dan penerapannya*. Jakarta: Ray Indonesia
- Elkington, John. 1997. Cannibals with forks, the triple bottom line of twentieth century business, dalam Teguh Sri Pembudi. 2005. CSR. Sebuah Keharusan dalam Investasi Sosial. Jakarta: Pusat Penyuluhan Sosial (PUSENSOS) Departemen Sosial RI. La Tofi Enterprise.
- Hafsah, Muhammad Jafar. 1999. *Kemitraan Usaha*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan.
- Harahap, Nuddin. 2010. *Penilaian Ekonomi Ekosistem Hutan Mangrove & Aplikasinya Dalam Perencanaan Wilayah Pesisir*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Haryanto, dkk. 1997. *Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Howlett, Michael, dan M. Ramesh. 1995. *Studyng Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystem*. Oxford: Oxford University Press
- Indrajit, dan Djokopranoto. 2003. *Konsep Manajemen Supply Chain*. Jakarta :PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 1999, *metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akutansi Dan Manajemen*, Yogyakarta : BPFE, 1999
- Irfan, Muhammad Ali. 2009. *Kumpulan Teori Kerjasama*. diakses 6 April 2017 <http://al-bantany-112.blogspot.co.id/2009/11/kumpulan-teori-kerjasama.html>
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Iqbal, Syaiful. 2007. Corporate Governance Sebagai Alat Pereda Praktik Manajemen Laba (Earnings Management). Ventura. Vol X, No 3, Hal 29-47. (Jurnal)

- Keban. Yermias T. 2007. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gavamedia.
- KNKG.2006.*Pedoman umum good corporate governance indonesia*. indonesia
- Kuncoro. 2005. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Martono and Drs. Ngadiso, 1995. *Translation*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Miles, Matthew B.,A. Michael Hberman and Johny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis*. California: SAGE Publication Inc. Diunduh dari [http://www.sagepub.com/updata55585_Chapter_1_Sample_Miles_Qualitative Data Analysis 3e 2.pdf](http://www.sagepub.com/updata55585_Chapter_1_Sample_Miles_Qualitative_Data_Analysis_3e_2.pdf)
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- _____.2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- _____.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muluk, Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi & Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press
- _____. 2007. *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology : ilmu pemerintahan baru 1 dan 2*. Jakarta : Rineka Cipta
- Noor, Y. R., M. Khazali, dan N. N. Suryadiputera. 1999. *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*. Bogor: Ditjen PHKA dan Wetlands Internasional Indonesia Program
- Pandia, Agnes Swetta. 2012. "Hutan Mangrove Surabaya Menyusut. Kompas.com", Diakses pada 14 Desember 2016 dari <http://sains.kompas.com/read/2012/11/06/12021566/sitemap.html>
- Peraturan presiden No 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
- Purnobasuki, Hary. *Tinjauan perspektif hutan mangrove*. 2005, Surabaya. Airlangga University Press
- Rasyid, Ryass. 1998. *Desentralisasi dalam menunjang pembangunan daerah dalam pembangunan administrasi di Indonesia*. Jakarta : PT. Pustaka LP3ES
- Salam M. D. A.T. Noguchi dan R. Pothitan, 2006. *Community Forest Management in Thailand: Current Situation and Dynamics in the Context of Sustainable Development*. New Forests 31. Springer.
- Saparinto, C. 2007. *Pendayagunaan Ekosistem Mangrove*. Semarang: PT. Dahara Prize.
- Sedarmayanti. 2004. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik)*. Bandung: Mandar Maju.

- _____. 2003. *Good governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam rangka otonomi daerah : upaya membangun organisasi efektif dan efisien melalui restrukturisasi dan pemberdayaan*. Bandung: Mandar Maju
- Siagian, P, Sondang. 2009. *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta, Bumi Aksara
- Sjamsuddin, Syamsiar. 2008. *Kepemerintahan dan Kemitraan*. Malang : Agritek YPN Malang.
- Soemarwoto, Otto. 2006. *Pembangunan berkelanjutan, antara teori dan realita*. Bandung: Unpad
- Solihin. 2008. *Corporate Social Responbility fron charity to sustainability*. Jakarta. Salemba Empat.
- Suhendra,K, 2006,*Peranan Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta
- Sumarto, Hetifah Sj. 2009. *Inovasi, partisipasi, dan good governance : 20 prakarsa inovatif dan partisipasif di Indonesia*. Jakarta: Yayasan obor indonesia.
- Subagyo, M. 1991. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Sugandhy, Aca., Rustam Hakim. 2009. *Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono (2013:244), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabat
- Syafiie, Kencana, Inu, DR. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta : Erlangga.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik.
- Utomo,Warsito. 2006. *Admnistrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmadari Adninistrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Undang-undang No. 40 Tahun 2007. “UU Perseroan Terbatas No 47 Tahun 2007”, diakses pada 11 Oktober 2016 www.kemendagri.go.id/media/documents/2007/08/20/PP_No_47_th_2007.pdf
- Undang-Undang Dasar 1945, diakses pada 5 Oktober 2016 www.dpr.go.id/jdih/uu1945
- Undang-undang No 41 Tahun 1999 “UU Kehutanan no 41 Tahun 1999”, diakses pada 5 Oktober 2016, kpa.or.id/dummy/publikasi/.../b29bc-uu-no-41-tahun-1999-tentang-kehutanan.pdf
- Undang-undang No 23 Tahun 2014, “UU Pemerintahan Daerah No 23 Tahun 2014”, diakses pada 13 Oktober 2016, pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf

- Widjaja, HAW. *Otonomi daerah dan daerah otonom*. 2002. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Wahyudi, Isa dan Azheri. 2008. *Prinsip Peraturan dan Implementasi*. Malang : I Trans Publishing.
- _____, 2011. *Corporate Social Responsibility: Prinsip, Pengaturan dan Implementasi*. Malang : Setara Pers (Group Penerbit Intrans)
- Wakka, Abd.Kadir. 2014. Analisis Stakeholders Pengolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea, 3(1) : 47-55 (Jurnal)
- Wibisono, Yusuf. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*. Gresik: Fascho Publishing
- WWF-Indonesia. 2008. "MoU untuk rehabilitasi Mangrove Pulau Tarakan ditandatangani", diakses pada 18 Februari 2017 dari <http://www.wwf.or.id/?1202>
- Zarkasyi, Moh. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan Dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.



LAMPIRAN



